

**HUBUNGAN BILATERAL RI-TIMOR TIMUR  
PASCA KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR**



**SKRIPSI**

**Digunakan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sastra  
Jurusan Ilmu Sejarah  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa**

**Oleh:**

**HASTUTINING DYAH WIJAYATMI**

**C0.500036**

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2004**

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Panitia Penguji Skripsi Fakultas Sastra Dan Seni Rupa  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Mengetahui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

( Drs.Sudarno, M.A )

NIP.131 472 212

( Tiwuk Kusuma Hastuti,SS )

NIP.132 255 146

**Diterima dan disetujui oleh Panitia Penguji**  
**Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret**  
**Pada tanggal : 13 April 2004**

Panitia Penguji:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. <u>Drs. Sri Agus, M.Pd.</u><br>Ketua Penguji      | ( _____ )<br>NIP. 131 633 901 |
| 2. <u>Drs. Supriadi, M.Hum</u><br>Sekretaris Penguji | ( _____ )<br>NIP. 131 841 833 |
| 3. <u>Drs. Sudarno, M.A.</u><br>Penguji Pertama      | ( _____ )<br>NIP. 131 472 212 |
| 4. <u>Tiwuk Kusuma Hastuti, SS.</u><br>Penguji Kedua | ( _____ )<br>NIP. 132 255 146 |

**Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa**  
**Universitas Sebelas Maret**  
**Surakarta**

( Dr. Maryono Dwiraharjo, S.U. )  
NIP. 130 675 147



*Sesungguhnya di dalam sejarah itu terdapat pesan-pesan yang penuh perlambang bagi orang-orang yang dapat memahaminya.*

( Q.S. Yusuf : 112 )

*Pengetahuan adalah kebenaran sejati, tidak peduli siapa ayahmu dan apa warna kulitmu.*

( Kahlil Gibran )

*Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat.*

( Abraham Lincoln )

*Pandanglah hari ini, kemarin sudah menjadi mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi kebohongan dan setiap hari esok sebagai visi harapan.*

( Alexander Pope )

*Hidup adalah soal kebenaran dalam menghadapi berbagai tanda tanya tanpa kita bisa mengerti dan menawarnya, maka terimalah dan hadapilah semua tantangan kehidupan.*

( Penulis )

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini untuk:*

- ✓ *Ibunda dan ayahanda tercinta*
- ✓ *Kakakku tercinta (Mas koko & Mbak Andrie)*
- ✓ *Alm.Adikku tercinta ( Dek Giri)*
- ✓ *Keponakanku tersayang*
- ✓ *Teman-teman seperjuangan*
- ✓ *Almamater*

## ABSTRAK

Hastutining Dyah Wijayatmi. C0500036. Hubungan Bilateral RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.2004.

Persoalan Timor Timur sejak berintegrasi sampai berpisah dengan NKRI melalui jajak pendapat yang diselenggarakan oleh UNAMET selalu menjadi fokus internasional. Banyak pihak luar yang melakukan intervensi dan campur tangan dalam persoalan ini sehingga memperlemah Politik Luar Negeri RI. Setelah Timor Timur merdeka dan berdaulat, maka penting bagi Pemerintah RI untuk membina hubungan bilateral dan kerjasama yang baik dengan negara tersebut untuk memperbaiki posisi dan citranya yang buruk di forum internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hubungan bilateral antara RI-Timor Timur pasca kemerdekaan Timor Timur, 2) Kebijakan politik luar negeri RI dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur, 3) Permasalahan yang dihadapi oleh RI dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen/arsip, studi pustaka, dan wawancara. Data yang di dapatkan dikritik, baik secara intern maupun ekstern sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut kemudian di interpretasikan dan di susun dalam sebuah *historiografi*.

Integrasi Timor Timur ke dalam NKRI sejak awal tidak diakui oleh PBB dan Portugal serta ditolak oleh Fretilin. Hal ini secara tidak langsung mendorong keinginan rakyat Timor Timur untuk berpisah dari NKRI. Selain itu juga juga didorong oleh banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer dan "ketidakadilan" yang mereka rasakan. Keinginan mereka untuk berpisah dari NKRI semakin kuat setelah Presiden B.J.Habibie pada tanggal 27 Januari 1999 mengeluarkan Keputusan secara mendadak tentang Opsi II untuk menyelesaikan persoalan Timor Timur dengan jajak pendapat menyusul Opsi I tanggal 9 Juni 1998. Hasil Jajak Pendapat yang diumumkan oleh PBB tanggal 4 September 1999 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas dan lebih memilih untuk berpisah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat diperoleh kesimpulan: 1) Pemerintah RI berusaha membina hubungan bilateral dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur, menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut, dan berusaha bersikap *forget and forgive* atas semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu; 2) Hubungan yang dibina dengan Timor Timur sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap negara-negara lain, berdasarkan pada Politik Luar Negeri Bebas Aktif; 3) Dalam usaha membina hubungan dan kerjasama yang baik, terdapat beberapa masalah yang merupakan sisa masalah atau *residual matter* masa lalu, yaitu tentang aset Pemerintah RI di Timor Timur, batas wilayah, dan pengungsi. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, antara lain dengan melakukan registrasi dan repatriasi para pengungsi, menanamkan modal,

serta menetapkan batas wilayah antara kedua negara bertetangga dengan melibatkan pemangku adat yang tinggal diperbatasan kedua negara.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum, wr.wb.

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokah serta inayah-Nya karena tanpa perkenan dan izin-Nya mustahil skripsi ini dapat selesai dengan baik. Syalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya.

Skripsi dengan judul “ Hubungan Bilateral RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur” ini merupakan hasil riset yang dilakukan selama lebih kurang enam bulan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sastra pada jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selama melakukan penelitian, terbukti bahwa sebenarnya pekerjaan seperti ini adalah hal yang mengasyikkan. Sungguhpun begitu tidak jarang pula dan sering kali menimbulkan frustrasi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa mereka tentu penelitian ini hanya akan berhenti pada sebatas proposal dan tidak pernah akan terwujud. Oleh karena itu berucap syukur dan terima kasih merupakan refleksi atas kekurangan dan kelemahan diri. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Maryono Dwirahardjo, S.U. Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penyusunan skripsi dan pemenuhan fasilitas selama studi.



2. Bapak Drs. Sri Agus, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs.Supariadi, M.Hum yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Sudarno, M.A, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan nasihat, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Tiwuk Kusuma Hastuti, SS, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Drs.Suharyana, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademis yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi nasihat, dan mengarahkan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini.
8. Ibunda dan Ayahanda atas semua kasih sayang yang telah diberikan, nasihat, dukungan, dan doa-doanya.
9. Saudaraku ( Mas Koko, Mbak Andri, dan keponakanku terimakasih atas kesabaran, pengertian dan dukungannya. Buat alm.Adikku Giri (semoga beristirahat dengan tenang di sisi-Nya).

10. Keluarga besar RP.Prodjomukarto dan Marto Atmojo terimakasih atas semua doa dan dukungan yang telah di berikan.
11. Mas Andrie terimakasih atas dukungan, dan kesabarannya.
12. Abangku Windrie terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
13. Kepala dan seluruh staf pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Nasional Museum Pers Surakarta, Perpustakaan Daerah Kotamadya Surakarta, Perpustakaan Daerah Propinsi Jogjakarta, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
14. Para informan yang telah bersedia memberikan informasi dan membagi pengalaman kepada penulis.
15. Sahabat dan saudaraku "*Charlie Angels*" (Lestari dan Dwie). You are parts of my life, thanks for everything. Semoga jarak yang akan membentang diantara kita tidak akan menghapus persahabatan yang telah terjalin.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2000, Taufik, Aliq, Sasongko, Aris "suback", Wahyu, Viera, Irwan, Irvan, Arif"mumun", Heri "abank", Shelly, Vita "ndut", Hartini, Denik, Heles, Gun-gun, Rika,Vika, Endang, Cecep, Agus, Dani, Widi, Eko, Topan, Ipin dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih atas persahabatannya selama ini. Sobat, perjuangan belum berakhir.
17. Ibu dan Bapak Drs.Choiruddin terimakasih atas tumpangnya selama ini.

18. Adik-adikku (Yani dan Intan) terimakasih atas dukungannya, semoga selalu dalam lindungan-Nya.
19. Teman-teman kost MUTIA GHANA (Eni, Mbak Umi, Putri, Shinta, Gita, Wiwin, Amin, Iatri. Terimakasih atas pengertian dan dukungan kalian).
20. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari -Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan tangan terbuka. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat sejarah. Amin.

Wassalamualaikum,wr.wb.

Surakarta, 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	18
1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data.....	19
a. Studi Dokumen.....	19
b. Studi Pustaka .....	20
c. Wawancara .....	20

2. Kritik Sumber .....	21
3. Teknik Analisa Data .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II INTEGRASI TIMOR TIMUR KE NKRI.....	26
A. Gambaran Umum Timor Timur .....	26
1. Keadaan Geografi dan Penduduk Timor Timur .....	26
2. Mata Pencarian .....	28
3. Pendidikan .....	28
B. Timor Timur Masa Pemerintahan Portugal .....	29
C. Timor Timur Masa Pemerintahan Indonesia .....	36
1. Pembangunan Propinsi Timor Timur .....	40
2. Diplomasi Pemerintah RI Di Forum Internasional Atas Integrasi Timor Timur Ke NKRI.. .....	.43
BAB III PEMERINTAHAN TRANSISI TIMOR TIMUR (UNTAET) .	47
A. Lepasnya Timor Timur Dari NKRI .....	47
1. Tawaran (Opsi) Penyelesaian Persoalan Timor Timur.....	47
2. Jajak Pendapat (referendum).....	57
B. Kerjasama Pemerintah RI-UNTAET.....	62
BAB IV HUBUNGAN BILATERAL RI-TIMOR TIMUR DALAM PENYELESAIAN <i>RESIDUAL MATTER</i> .....	69
A. Kebijakan Politik Luar Negeri RI Dalam Membina Hubungan Bilateral Dengan Timor Timur .....	71
B. Masalah-Masalah Dalam Membina Hubungan	

Bilateral RI- Timor Timur .....	80
1. Aset Milik Pemerintah RI .....	81
2. Batas Wilayah .....	83
3. Pengungsi .....	84
BAB V KESIMPULAN .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	96
DAFTAR INFORMAN .....	101
LAMPIRAN .....	103

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Peta Negara RDTL/Timor Timur**
- LAMPIRAN II : Arsip DPR RI No: AA-5/KD/1864/DPR-RI/1976**
- LAMPIRAN III : Arsip DPR RI Tahun 1976**
- LAMPIRAN IV : Arsip Lembaran Negara RI No.35, Tahun 1976**
- LAMPIRAN V : Arsip Lembaran Negara RI No.39, Tahun 1976**
- LAMPIRAN VI : Arsip Lembaran Negara RI No.56, Tahun 1977**
- LAMPIRAN VII : Arsip Lembaran Negara RI No.3, Tahun 1977**
- LAMPIRAN VIII : Arsip Sekneg RI No.B-025/Setneg/Assus/9/1978**
- LAMPIRAN IX : Proklamasi Integrasi**
- LAMPIRAN X : Susunan Pemerintah RDTL**
- LAMPIRAN XI : Persetujuan antara RI dan Republik Portugal  
Mengenai masalah Timor Timur**
- LAMPIRAN XII : Keputusan Majelis No.292 mengenai Timor Timur**
- LAMPIRAN XIII : Pernyataan sikap para uskup Dioses Dili dan Dioses  
Bacau**
- LAMPIRAN XIV : Kesepakatan tentang penghentian permusuhan dan  
upaya untuk mencapai perdamaian di Timor Timur**
- LAMPIRAN XV : Seruan bersama oleh CNRT dan Falintil dan Pro  
Integrasi dalam rangka penentuan pendapat di Timor  
Timur**

- LAMPIRAN XVI : Kesepakatan bersama CNRT dan Falintil dan Pro  
Integrasi dalam rangka penentuan pendapat di Timor  
Timur**
- LAMPIRAN XVII : Memorandum**
- LAMPIRAN XVIII : Kerangka Konstitusional Otonomi Khusus bagi Timor  
Timur**
- LAMPIRAN XIX : Brosur jajak Pendapat**
- LAMPIRAN XX : Perkembangan situasi di Timor Timur**
- LAMPIRAN XXI : Rekapitulasi macam pelanggaran pada penentuan  
pendapat di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999**
- LAMPIRAN XXII : Rekapitulasi pelanggaran jajak pendapat tanggal 30  
Agustus 1999**



## DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
ADITLA	: Associacio Democratico Integracao Timor Leste Australia
AIETD	: All Inclusive East Timorese Dialogue
AL	: Angkatan Laut
ANP	: Accao Nacional Popular
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
APODETI	: Associacio Popular Democratica Timorese
AS	: Amerika Serikat
ASDT	: Associacio Social Democratica Timorese
AU	: Angkatan Udara
BAKMP	: Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk
BAKORSUTANAL	: Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CNRT	: Concelho Nacional Resistencia Timorese
DK	: Dewan Keamanan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ETSG	: East Timor Study Group
FORTILOS	: Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Leste

FRETILIN	: Frente Revolucionare de Timor Leste Independente
GBHN	: Garis Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
INTERFET	: International Force East Timor
JBC	: Joint Border Commission
JC	: Joint Commission
KIE	: Konsultasi Informasi dan Edukasi
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOTA	: Klibur OanTimor Aswain
KPI	: Komisi Pemilihan Independen
KPS	: Komisi Perdamaian dan Stabilitas
KUKRI	: Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia
LINUD	: LintasUdara
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MFA	: Movimento das Forcas Armada
MNF	: Multinational Force
MoU	: Memorandum of Understanding
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NCC	: National Conculative Council
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PCP	: Portugal of Communys Partie

PD	: Perang Dunia
PDM	: Pemberlakuan Darurat Militer
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMA	: Penanaman Modal Asing
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PSTT	: Pemerintah Sementara Timor Timur
RDTL	: Republik Demokratik Timor Leste
RI	: Republik Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SAPT	: Sociedade Agricola Patriae Trabalho
SOM	: Senior Official Meeting
SU	: Sidang Umum
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UDT	: Uniao Democratica Timorese
UNAMET	: United Nation Mission in East Timor
UNDP	: United Nation Development Bank
UNHCR	: United Nation High Commission of Refugees
UNTAET	: United Nation Transitional Administration of East Timor
UU	: Undang Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## **DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Kol.(Purn) Michael Rodrick Ronny Muaya, S.H.  
Umur : 57 tahun  
Pekerjaan : Ketua Forum Komunikasi Pejuang dan Warakawuri Operasi Seroja  
Alamat : Jl.Pisang No.1, Wisma Seroja, Bulak Macan, Harapan Jaya, Bekasi Utara.
2. Nama : Serma Sukoro  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Ketua Veteran khusus Wisma Seroja  
Alamat : Jl.Belimbing No.15.B, Wisma Seroja, Bulak Macan, Bekasi Utara.
3. Nama : Serka Untung  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD  
Alamat : Gayam Prit, Klaten, Jawa Tengah.
4. Nama : Kopral Kepala (Purn) Lustiawan  
Umur : 49 tahun  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD dari Batalyon KOSTRAD 408510, Jawa Tengah  
Alamat : Jl.Belimbing No.36.A, Wisma Seroja, Bulak Macan, Harapan Jaya, Bekasi Utara.
5. Nama : Kopka A.Latief Lessy  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : TNI AD aktif  
Alamat : Jl.Delima No.5.B, Wisma Seroja, Bulak Macan, Harapan Jaya, Bekasi Utara.
6. Nama : Koptu Marinir Paryoto  
Umur : 59 tahun

Pekerjaan : Purnawirawan ABRI AL dari Kesatuan Lamtama, Jakarta  
Alamat : Jl.Jambu No.7.B, Wisma Seroja, Bulak Macan, Harapan Jaya,  
Bekasi Utara.

7. Nama : Koptu Haryono  
Umur : 48 tahun  
Pekerjaan : Purnawirawan dari kesatuan Pusat Rehabilitasi Cacat Hankam  
Alamat : Jl.Pisang No.15.A, Wisma Seroja, Bulak Macan, Harapan  
Jaya, Bekasi Utara.
8. Nama : Ibu Sumartini  
Umur : 60 tahun  
Pekerjaan : Pengurus Forum Komunikasi Pejuang dan Wawakawuri  
Operasi Seroja  
Alamat : Jl.Pisang, Wisma Seroja, Bulak Macan, Harapan Jaya, Bekasi  
Utara.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Politik luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam berbagai *event* bilateral, regional, dan multilateral, khususnya sebelum terjadi krisis multidimensional dipandang oleh banyak negara telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan stabilitas regional dan internasional. Akan tetapi keberhasilan-keberhasilan tersebut ternyata tidak membebaskan Indonesia sepenuhnya dari tekanan-tekanan masyarakat internasional khususnya dalam isu-isu yang masih mengalami banyak kendala dalam penanganannya didalam negeri, seperti : masalah Timor Timur, Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, dan lain-lain<sup>1</sup>.

Timor Timur meskipun relatif singkat berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi telah menorehkan sejarah yang tidak sedikit bagi sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia. Daerah dengan luas sekitar 14.989.375 Km<sup>2</sup> ini adalah daerah yang tandus dan sebagian besar dari wilayahnya berupa pegunungan yang tidak vulkanis. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah berladang

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, *Interim Report Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, 2000), hal.1.

(*shifting cultivation*), yaitu bercocok tanam secara tradisional atau bahkan masih primitif dan berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain<sup>2</sup>.

Proses sejarah yang panjang dan sering diwarnai dengan pertentangan antar partai yang berkuasa dialami oleh rakyat Timor Timur sebelum menetapkan kesepakatan untuk berintegrasi dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partai Apodeti, Fretilin, KOTA, Tralabista, dan UDT sering berbeda pendapat mengenai kelangsungan hidup rakyat dan bangsa Timor Timur selanjutnya. Keempat partai (Apodeti, KOTA, Tralabista, dan UDT) pada akhirnya berkoalisi dan menghendaki bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun pada awalnya partai UDT menentang rencana dan usulan untuk berintegrasi dengan NKRI. Adapun Fretilin dari awal menentang usulan tersebut dan sebagai puncaknya pada tanggal 28 November 1975 partai ini berhasil mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan (*Declaration of Independence*).

Berawal dari Proklamasi Kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Fretilin, maka keempat partai lainnya terdorong untuk melakukan suatu tindakan. Tepat pada tanggal 30 November 1975, keempat pemimpin partai atas nama rakyat Timor Timur menyatukan kehendak dan hasrat mereka untuk bersatu dan menjadi bagian dari negara Indonesia. Peristiwa itu dilakukan di Balibo sehingga dikenal dengan "*Deklarasi Balibo*". Sebagai tindak-lanjut dari peristiwa itu maka kemudian dibentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) dengan sebuah deklarasi pada tanggal 17 Desember 1975 yang ditandatangani oleh keempat

---

<sup>2</sup> Machmuddin Noor, dkk, *Lahirnya Propinsi Timor Timur*, (Jakarta: Badan Penerbit

pemimpin partai tersebut. Dengan adanya Proklamasi atau deklarasi Balibo yang kemudian diikuti dengan deklarasi PSTT itu maka secara *defacto* dan *dejure* Pemerintah Portugal sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi atas Timor Timur.

Keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia yang kuat menjadi pendorong bagi dikeluarkannya Petisi Rakyat Timor Timur tanggal 31 Mei 1976. Adapun isi dari Petisi tersebut adalah :

“Mendesak kepada pemerintah RI agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat serta wilayah Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa referendum”<sup>3</sup>.

Petisi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden dan diterima oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Juni 1976. Atas petisi tersebut maka Presiden kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Presiden RI No.113/LN tahun 1976 yang diikuti dengan dibentuknya Delegasi Pemerintah RI ke Timor Timur. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1976 wilayah Timor Timur secara resmi dan sah berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Propinsi yang ke-27. Hal ini diperkuat dengan UU No.7 tahun 1976 dan Tap MPR No.VI/MPR/1978.

Keinginan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya dengan berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya apabila kita kaji adalah tidak bertentangan dengan Piagam Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) yang dideklarasikan PBB pada tahun 1948 dan

---

Almanak RI/BP ,2000), hal.6.

<sup>3</sup> Machmuddin Noor,dkk,*Ibid.*, hal.18.



sesuai dengan konstitusi negara Indonesia<sup>4</sup> meskipun sejak awal hal itu tidak diakui secara sah oleh PBB.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, integrasi Timor Timur ke Negara Kesatuan RI tidak menguntungkan Indonesia karena seperti telah dijelaskan di depan bahwa wilayah Timor Timur berupa pegunungan dan merupakan daerah yang miskin, tandus, penduduknya terbelakang dan bodoh dibandingkan dengan penduduk daerah lain (khususnya Jawa). Akan tetapi bagaimanapun keadaan Timor Timur pada saat itu Pemerintah Republik Indonesia menerima secara terbuka keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Penerimaan itu tentunya dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang mendasari. Pertama adalah bahwa dari perspektif sejarah ada persamaan nasib antara keduanya sebagai bangsa yang terjajah dan tertindas. Alasan kedua adalah dilihat dari segi geografis letak keduanya saling berdekatan, bahkan ada bagian wilayah Timor Timur yang masuk kedalam wilayah Indonesia di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ketiga dan merupakan alasan utama adalah dari segi politis untuk memperluas wilayahnya.

Sangat disayangkan bahwa kembalinya “*si anak hilang*” kepangkuan ibunya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat (23 tahun). Pada masa Pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999) yang singkat sebagai pengganti penguasa Orde Baru ( Soeharto ), cakrawala baru bagi penyelesaian kasus Timor Timur semakin terbuka. Usaha dan keinginan rakyat Timor Timur untuk merdeka mendapatkan tanggapan positif dari Pemerintah (dalam hal ini adalah Habibie).

---

<sup>4</sup> Sesuai dengan alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Dalam masa pemerintahan yang singkat itu, Habibie melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas menawarkan dua pilihan atau Opsi bagi rakyat Timor Timur pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi pertama adalah pemberian status khusus dengan otonomi luas sebagai penyelesaian akhir persoalan Timor Timur. Opsi kedua adalah jika Opsi pertama tersebut gagal dan ditolak oleh rakyat Timor Timur, maka pemerintah Indonesia akan memerintahkan para wakil rakyat hasil pemilu 1999 untuk mempertimbangkan kemungkinan pelepasan Timor Timur melalui Sidang Umum MPR 1999.

Dua Opsi yang ditawarkan oleh pemerintah Habibie tersebut merupakan kebijakan yang tidak terduga dan sangat mengejutkan, baik bagi masyarakat domestik maupun internasional. Ditingkat lokal Timor Timur, keluarnya Opsi dari pemerintah tersebut disambut secara antusias oleh kelompok pro-kemerdekaan yang sering disebut sebagai kelompok pro-referendum atau anti-integrasi karena kebijakan tersebut membuka peluang bagi terwujudnya suatu Timor Leste yang merdeka, berdaulat, dan terlepas dari kekuasaan Indonesia ataupun Portugal. Bagi rakyat pro-integrasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Opsi kedua dirasa sangat mengecewakan dan merupakan langkah yang terburu-buru. Akan tetapi dalam suatu Jajak Pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur lebih memilih Opsi kedua yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga terbentuk negara Timor Timur merdeka sampai sekarang.

Proses integrasi Timor Timur ke Indonesia sebenarnya membawa dilema bagi Pemerintah Republik Indonesia. Pada satu sisi Pemerintah Republik

Indonesia menyambut baik dan menerima keinginan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan NKRI, tetapi pada sisi lainnya Pemerintah Republik Indonesia mendapat sikap tidak bersahabat dan kecaman dari dunia internasional. Kecaman keras dan kritik pedas dilontarkan oleh Portugal. Bahkan atas peristiwa tersebut pemerintah Portugal membekukan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia secara sepihak pada tanggal 7 Desember 1975. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak pernah mengakui secara sah integrasi Timor Timur ke Indonesia itu. Mereka beranggapan bahwa proses integrasi itu dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan paksaan dan menggunakan cara kekerasan serta banyak melakukan pelanggaran HAM. Disamping itu Indonesia dinilai memiliki tujuan tertentu dalam usaha pencaplokan wilayah Timor Timur sehingga dapat membahayakan proses perdamaian dunia. Menanggapi kecurigaan dan kecaman dari internasional itu, Pemerintah Republik Indonesia berusaha melakukan pendekatan-pendekatan secara personal dengan negara yang menentang keputusan Indonesia atas Timor Timur, bahkan usaha diplomasi juga dilakukan oleh Indonesia di forum internasional dalam Sidang Umum PBB sejak tahun 1976. Akan tetapi karena kelemahan dan kegagalan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui wakil-wakilnya di forum internasional, serta perkembangan global yang menyoroti masalah HAM, demokratisasi, dan kemanusiaan menyebabkan banyak pihak luar yang melakukan tekanan dan ikut campur dalam persoalan Timor Timur. Hal ini antara lain yang ikut mendorong lepasnya Timor Timur dari NKRI, disamping karena konflik dan perang saudara yang berkepanjangan di Timor Timur.

Pasca Timor Timur berpisah dari NKRI melalui Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh UNAMET (30 Agustus 1999) dan resmi merdeka (20 Mei 2002), Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkepentingan untuk membina hubungan bilateral dengan Timor Timur. Sesuai dengan perkembangan zaman, hubungan bilateral tidak hanya berfokus pada bidang formal tetapi juga dalam bidang non formal, seperti bidang ekonomi, perdagangan, kemanusiaan, dan sosial. Oleh karena itu kedua negara tidak dapat mengesampingkan sejarah yang terjadi pada masa lalu.

Kemerdekaan Timor Timur meninggalkan permasalahan bagi Pemerintah Republik Indonesia yang memerlukan penyelesaian secara serius karena hal ini berpengaruh terhadap hubungan antara kedua negara di masa depan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain adalah mengenai pengungsi, status kewarganegaraan, batas wilayah, dan aset Pemerintah RI di Timor Timur.

Sampai saat ini banyak pengungsi yang berasal dari bekas Propinsi Timor Timur yang masih bertahan dalam kamp-kamp pengungsian di wilayah perbatasan antara Timor Timur dan Timor Barat. Keberadaan mereka menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan disamping menjadi masalah bagi

Pemerintah Pusat.

Alasan penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkaji masalah Timor Timur didasari pada keinginan untuk melihat sejauh mana masalah Timor Timur yang pernah berintegrasi dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara karena secara *defacto* Timor Timur sudah melepaskan diri dari negara Indonesia pada tahun 1999 dan menjadi negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Secara khusus masalah Timor Timur menarik untuk dikaji dengan beberapa alasan sebagai

berikut : pertama, setelah Timor Timur dinyatakan secara resmi telah berintegrasi dengan Indonesia, masalah ini lebih banyak menjadi sorotan negara luar dan dunia internasional dibanding oleh masyarakat dalam negeri sendiri. Masalah ini lebih dikarenakan adanya suara-suara sumbang dan kecaman-kecaman didalam menanggapi masalah tersebut. Kedua, masalah ini juga tergolong masalah internasional karena masalah tersebut cukup menyita perhatian Pemerintah Indonesia dengan waktu yang relatif panjang serta masih ditambah dengan Portugal sebagai bekas penjajah atau penguasa memasukkan persoalan Timor Timur kedalam suatu agenda PBB untuk dapat diperdebatkan sebagai masalah dekolonisasi.

Alasan lain yang mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan ini adalah karena studi berkaitan dengan hubungan bilateral antara Pemerintah RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur belum ada yang meneliti, sehingga skripsi ini merupakan suatu karya asli. Disamping itu, banyak studi penelitian sejarah yang ditulis oleh sejarawan lebih cenderung mengkaji permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya ataupun religi masyarakat Jawa atau bersifat *Java Centris*. Bertolak dari hal-hal tersebut diatas maka studi ini mencoba untuk lebih menggali masalah Timor Timur dari aspek historis yang berhubungan dengan peristiwa kemerdekaan dan lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hubungan bilateral antara kedua negara pasca kemerdekaan Timor Timur.

## B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Pada dasarnya setiap orang ataupun bangsa mempunyai keinginan untuk bebas dan merdeka tanpa ada campur tangan, intervensi, dan pengaruh siapapun atau pihak manapun. Kemerdekaan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang ataupun bangsa. Adanya jaminan hak asasi mengenai kebebasan dan kemerdekaan membuat setiap orang ataupun bangsa berhak untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri seperti diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Setiap orang ataupun bangsa berhak melakukan hubungan atau kerjasama (*relation*) dengan siapapun selama hubungan yang terjalin itu saling menguntungkan kedua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, studi penelitian ini berusaha mencoba untuk mengungkap masalah hubungan bilateral RI dan Timor Timur pasca kemerdekaan Timor Timur. Adapun masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan bilateral Antara Republik Indonesia dan Timor Timur pasca kemerdekaan Timor Timur?
2. Bagaimana kebijakan Politik Luar Negeri RI dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur?
3. Permasalahan apa yang dihadapi oleh RI dalam membina hubungan bilateral itu?

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari *scope temporal* dan *scope spasial*. Dalam *scope temporal* difokuskan pada masa pasca kemerdekaan Timor Timur

untuk mengkaji hubungan yang terjalin diantara kedua negara. Akan tetapi dalam pembahasan ini dijelaskan juga keadaan-keadaan yang melatarbelakanginya. Adapun mengenai *scope spasial* yang diambil berfokus pada scope nasional (Indonesia).

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul Hubungan Bilateral RI -Timor

Timor Pasca Kemerdekaan Timor Timur adalah:

1. Mengetahui hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Timor Timur pasca kemerdekaan Timor Timur.
2. Mengetahui bagaimana kebijakan politik Luar Negeri Republik Indonesia dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur.
3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Republik Indonesia dalam hubungan bilateral.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Maksud manfaat atau kegunaan penelitian adalah manfaat langsung ataupun tidak langsung yang diperoleh dari penerapan penelitian yang meliputi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk perkembangan ilmu sejarah, terutama penjelasan dengan tema sejarah sosial politik hubungan bilateral antar negara sehingga dapat digunakan untuk tambahan hasil penelitian sejarah.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peminat masalah-masalah sejarah sosial-politik dan ketatanegaraan dalam konteks hubungan bilateral antara dua negara yang bertetangga terutama dalam hal ini yang berhubungan dengan Indonesia dan Timor Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab sebagian masalah yang berhubungan dengan hubungan bilateral antar negara yang bertetangga.

### ***E. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka***

Tema studi ini adalah sejarah politik yang kajiannya menekankan pada aspek historis. Oleh karena pokok permasalahan dalam tema ini kompleks, maka sumber konsep-konsep dan teori ilmu lain dipergunakan untuk menerangkan peristiwa yang sedang ataupun telah terjadi. Disamping itu, konsep-konsep dapat dipergunakan sebagai alat pemahaman dalam membantu penganalisaan pada uraian-uraian dari bab-bab yang dikembangkan dalam penelitian.

Proses sejarah telah terjadi sehingga Indonesia sebagai negara berpaham Politik luar negeri bebas aktif tentunya dalam menjalankan hubungan kerjasama



dengan siapapun, dalam hal ini dengan Timor Timur memiliki tujuan yang mulia sehingga terjalin hubungan harmonis diantara keduanya. Hubungan yang terjalin merupakan hubungan yang saling menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh adanya hubungan tersebut.

Untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diambil, maka kerangka teori yang diajukan adalah konsep Politik luar negeri. Dalam *The Internasional Relation Dictionary* disebutkan bahwa Politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain, atau kelompok-kelompok dalam sistem internasional yang ditujukan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu dalam skema kepentingan nasional<sup>5</sup>. Holsti menyebutkan bahwa politik luar negeri merupakan rumusan konkret yang berasal dari gabungan antara kepentingan nasional, situasi internasional yang sedang berlaku, serta kekuatan negara<sup>6</sup>. Kepentingan nasional itu sendiri diartikan sebagai tujuan dasar dan faktor utama yang mengarahkan para pembuat keputusan dalam menentukan kebijaksanaan luar negeri, kepentingan nasional adalah gambaran yang paling umum dan elemen-elemen tersebut meliputi kesejahteraan, perlindungan individu, kemerdekaan, integrasi teritorial, keamanan, dan kemakmuran ekonomi.

Belajar dari proses terciptanya kebijaksanaan pemberian opsi II oleh pemerintahan Presiden Habibie maka Indonesia saat itu “terjebak” dalam suatu proses pengambilan keputusan yang sangat lemah. Holsti mengistilahkan dengan

---

<sup>5</sup> Jack C.Plano dan Roy Olton, *The Internasional Relations Dictionary*, (New York: Rinehart and Wiston.Inc,1969), hal.27.

*crisis decision making* atau krisis pengambilan keputusan dimana ketiga unsur krisis kebijaksanaan yaitu, adanya *surprise, high threat*, dan *short decision time* terjadi dalam pemberian opsi II. Krisis kebijaksanaan dalam kasus Timor Timur membuat usulan opsi kedua sangat sulit diterima oleh banyak pihak di tanah air dan merupakan kejutan bagi masyarakat internasional.

Untuk memahami persoalan integrasi rakyat Timor Timur dengan NKRI yang hanya berlangsung dalam waktu singkat (23 tahun), digunakan konsep integrasi dan teori konflik. Timor Timur berintegrasi dengan NKRI meskipun tidak lama adalah karena adanya kesamaan nasib dengan Indonesia sebagai bekas daerah jajahan. Integrasi itu berlangsung tidak lama karena adanya konflik kepentingan, ketakutan, dan kecemburuan rakyat Timor Timur terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan konsep integrasi dari Ernst Haas. Integrasi didefinisikan oleh Ernst Haas sebagai proses dimana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi antar negara-negara nasional yang ada sebelumnya<sup>7</sup>.

Konflik dapat terjadi antara sesama individu, individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok lain. Dahrendorf berpendapat bahwa sumber konflik merupakan hubungan wewenang yang telah disahkan dan

---

<sup>6</sup> K.J.Holsti, *Politik Internasional Kerangka Analisa*, ( Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1987), hal.135.

<sup>7</sup> Ernst Haas dikutip dalam Joseph Nys, “ Peace in Parts”, ( Little Brown, 1971), hal.25 dalam Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, ( Jakarta: LP3ES, 1990), hal.53.

melembaga dalam suatu asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif. Lebih lanjut Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik muncul karena perbedaan kepentingan obyektif antara kelompok yang dominan dengan yang didominasi<sup>8</sup>. Sementara Berghe mengemukakan bahwa konflik memberi sumbangan terhadap integrasi, begitu juga sebaliknya<sup>9</sup>. Hal itu terjadi dengan memperhatikan proses-proses sosial yang terjadi didalamnya. Apa yang terjadi dengan Timor Timur dapat dikaji dengan teori ini. Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia karena ada konflik dalam masyarakatnya yang tampak dalam partai yang berkuasa dan dalam perjalanan selanjutnya integrasi Timor Timur memunculkan konflik kembali sehingga terjadi disintegrasi.

Dalam suatu penelitian sejarah, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penelaahan serta memberikan kerangka berpikir dalam penulisan maka perlu adanya buku-buku penunjang yang mengkaji permasalahan yang sedang dikaji. Suatu kajian tentang Timor Timur dikaji dalam buku yang berjudul *Lahirnya Propinsi Timor Timur* karangan Machmuddin Noor dan Slamet Moeljono.dkk<sup>10</sup>. Dalam buku ini dijelaskan tentang UU No.7 tahun 1976 berkaitan dengan pengesahan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia dan dibentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, juga dijelaskan mengenai perjalanan rakyat Timor Timur untuk bergabung kepangkuan Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ralf Dahrendorf, "Case and Class Conflict In Industrial Society".hal.162 dalam Nurhadiantomo, *Hukum Reintegrasi Sosial dan Konflik-konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 20000). hal.28.

<sup>9</sup> Piere L.van den Berghe, "Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis", dalam George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992). hal.34.

<sup>10</sup> Machmuddin Noor,dkk, *Lahirnya Propinsi Timor Timur*, ( Jakarta : Badan Penerbit Almanak RI/ Balai Pustaka).

Disamping itu buku ini juga memuat dokumen-dokumen bersejarah lainnya berkaitan dengan Timor Timur.

Selain itu juga digunakan buku yang berjudul *Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur Yang Dilupakan* karya John G.Taylor diterbitkan oleh Forum Solidaritas Untuk Rakyat Timor Timur (Fortilos) tahun 1998<sup>11</sup>. Buku ini berisi tentang kejadian atau konfrontasi yang terjadi di Aceh, Riau, Irian Jaya, dan Timor Timur serta kronologis sejarah kontemporer Timor Timur sejak 1974. Buku ini digunakan untuk mengkaji dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kronologis di Timor Timur yang dimulai sejak tanggal 25 April 1974, yaitu Gerakan Angkatan Bersenjata (*Armed Forces Movement*) melancarkan kudeta di Lisabon sampai pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur yang mengantarkan kepada kemerdekaan Timor Timur.

Buku lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Helen Mary Hill yang berjudul *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae* yang diterbitkan oleh yayasan HAK dan Sahe Institute for Liberation Dili tahun 2000<sup>12</sup>. Buku ini mengupas tentang gerakan nasionalis Timor Lorosae-Fretilin (*Frente Revolusionare de Timor Leste Independente, Front Revolusioner kemerdekaan Timor Lorosae*) dan pendahulunya-ASDT (*Associacio Social Democratika Timorensis, Perhimpunan Demokrasi Sosial Timor*) serta kelompok bawah tanah anti kolonial sebelum rezim fasis Caetano masih berkuasa. Dengan menyoroti asal-usul, gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan politik, serta metode-metode

---

<sup>11</sup> John.G.Taylor, *Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur yang Dilupakan*, ( Dili : Fortilos, 1998).

kerja Fretilin , Helen Hill-penulis buku ini mengungkapkan akar-akar kemampuan gerakan pembebasan nasional ini untuk bertahan dan melawan kekuasaan yang jauh lebih kuat darinya. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji salah satu faktor utama yang mendorong gerakan perlawanan Timor Lorosae hingga akhirnya berhasil mengusir penguasa pendudukan Indonesia yang menginvasi dan menduduki negara itu mulai Desember 1975, yaitu kemunculan kembali kekuatan dan pengaruh partai Fretilin.

Dalam penulisan ini juga digunakan buku yang berjudul *Indonesia di Ambang Perpecahan?* karangan Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna terbitan tahun 2000<sup>13</sup>. Buku ini antara lain mengkaji tentang upaya penyelesaian konflik Timor Timur pasca lengsernya pemerintahan Soeharto (21 Mei 1998) tepatnya pada masa pemerintahan Habibie. Presiden Habibie pada saat itu melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas menawarkan dua pilihan (Ops) kepada rakyat Timor Timur. Ops pertama adalah pemberian status khusus dengan otonomi luas bagi rakyat Timor Timur dan ops kedua adalah kemungkinan pelepasan Timor Timur melalui Sidang Umum MPR 1999. Kedua Ops ini sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup rakyat Timor Timur hingga akhirnya kemerdekaan yang mereka inginkan tercapai.

Hubungan bilateral merupakan hubungan yang terjadi antara dua negara. Hal ini berkaitan dengan Politik luar negeri suatu bangsa. Untuk mengkaji masalah ini maka digunakan buku yang berjudul *Interim Report pelaksanaan*

---

<sup>12</sup> Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, ( Dili : Yayasan HAK dan Sahe Institute for Liberation, 2000).

*Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur* yang ditulis oleh Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI dan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI tahun 2000<sup>14</sup>. Buku ini antara lain menguraikan permasalahan Timor Timur dalam Politik luar negeri Indonesia, masuknya Timor Timur dipangkuan Indonesia, diplomasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB, hubungan RI-Timor Timur di masa depan.

Selama dasawarsa terakhir ini fenomena hubungan internasional mengalami perkembangan dan dinamika yang sangat cepat, bukan saja karena terjadinya perubahan konstelasi global dalam hubungan Timor-Barat tetapi juga karena perubahan-perubahan internal yang terjadi pada masing-masing blok tersebut. Fenomena hubungan internasional telah memasuki dimensi-dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai. Buku karangan Mohtar Mas'oeed yang berjudul *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*<sup>15</sup> ini relevan digunakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan hubungan bilateral yang merupakan bagian dari hubungan internasional.

Berkaitan dengan hubungan bilateral antara dua negara, dalam skripsi ini juga menggunakan buku karangan K.J.Holsti yang berjudul *Politik Internasional*

---

<sup>13</sup> Syamsuddin Harris dan M.Riefki Muna, *Indonesia di Ambang Perpecahan?*, ( Jakarta, 2000).

<sup>14</sup> Tim Balitbang Deplu RI, *Interim Report Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur*, ( Jakarta : Balitbang Deplu RI, 2000).

<sup>15</sup> Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

*Kerangka Analisa*<sup>16</sup>. Buku ini relevan untuk digunakan sebagai acuan karena semakin disadari di dalam masyarakat bahwa pengaruh dan dampak kejadian di luar negeri sangat besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan keamanan suatu negara. Hal itu berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sehingga mempengaruhi citra dan posisi suatu negara di forum internasional. Semakin disadari juga bahwa rumusan mengenai Politik luar negeri adalah kepanjangan dari kepentingan politik dalam negeri yang diteruskan ke luar negeri telah berubah dan diganti dengan Politik luar negeri merupakan reaksi terhadap tantangan berita yang disebabkan perkembangan internasional.

Situasi di Timor Timur pasca Jajak Pendapat menjadi tidak terkendali sehingga kematian menghantui setiap orang yang berada di wilayah itu. Hal tersebut menyebabkan banyak orang mengungsi dan berusaha menyelamatkan diri. Para pengungsi umumnya hidup dalam keadaan serba kekurangan. Masalah pengungsi merupakan satu dari beberapa *residual matter* yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut buku karangan Sindhunata yang berjudul *Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur*<sup>17</sup> sesuai untuk digunakan sebagai acuan.

## ***F. Metode Penelitian***

---

<sup>16</sup> K.J.Holsti, *Politik Internasional Kerangka Analisa*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987).

<sup>17</sup> Sindhunata, *Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003).

Dalam kajian penelitian yang berjudul Hubungan Bilateral antara Pemerintah RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur ini menggunakan pendekatan metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari empat langkah sebagai berikut, pertama Heuristik yaitu kegiatan atau suatu proses pengumpulan sumber data sebanyak-banyaknya, tetapi sumber data tersebut masih dalam cakupan tema dan permasalahan penelitian. Langkah kedua adalah kritik sumber atau penilaian data, merupakan suatu proses menilai atau mengkritik sumber yang didapat baik secara intern maupun ekstern.

Langkah ketiga interpretasi, dilakukan untuk menafsirkan keterangan yang saling berhubungan secara kronologis dengan fakta-fakta yang diperoleh dan telah lulus kritik. Langkah keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada langkah ini disajikan hasil penelitian yang berupa penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesa kisah yang bulat<sup>18</sup>. Kisah itu isinya terbagi dalam bab-bab, sub-sub, dan butir-butir dari sub-bab yang didasarkan atas prinsip “serialisasi”. Oleh sebab itu laporan disusun menurut teknik penulisan sejarah<sup>19</sup>.

### **1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang digali dari bahan-bahan yang berbentuk data, merupakan bahan utama dalam penelitian sejarah karena sebagian besar data dan fakta tersimpan didalamnya. Dalam pengumpulan ini data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh

---

<sup>18</sup> Louis Gottschalt, *Mengerti Sejarah*, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hal.32.

<sup>19</sup> Kent Shermant, *Writing History*, (New York:Appleton Century Crofts,1967), hal. 56-74.



melalui studi dokumen dan arsip (*Analysist content*), sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui study pustaka (*Library research*).

a. Study Bahan Dokumen dan Arsip (*Analysist content*)

Bahan dokumen sangat penting dalam mendukung terselenggaranya karya penulisan sejarah. Metode dokumen adalah metode penelitian dengan pengumpulan data yang digali dari bahan-bahan dokumen. Dokumen berfungsi menyajikan data untuk menguji dan memberi gambaran bagi penulis sehingga dapat memberi fakta-fakta untuk memperoleh pengertian historis tentang fenomena yang unik. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip, laporan, memori, peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan, catatan-catatan, dan lembaran negara.

b. Study Pustaka (*Library research*)

Sebagai pendukung dan pelengkap sekaligus sebagai kerangka dasar teori, maka penelitian ini menggunakan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku karya ilmiah dan buku-buku pengetahuan. Adapun buku yang dimaksud adalah yang dapat menunjukkan tentang masalah sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu juga digunakan buku atau sumber-sumber lain yang dapat digunakan sebagai acuan, misalnya majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

Studi Pustaka dalam penelitian ini dilakukan antara lain di museum Pers dan Arsip Surakarta, Perpustakaan Daerah Surakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada,

Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, dan Perpustakaan pusat Jakarta serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah dialog atau percakapan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau pandangan secara lisan yang langsung ataupun tidak langsung terhadap informan yang mengetahui dan berpartisipasi dalam suatu peristiwa. Dalam wawancara penulis menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur. Wawancara ini tidak terkait dengan ruang dan waktu dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik antara peneliti dengan informan, sehingga validitas data dapat diperoleh.

## **2. Kritik Sumber**

Dalam hal kritik, sejarawan harus memikirkan unsur-unsur yang relevan dalam sebuah dokumen. Mengenai tingkat kredibilitas sumber data, tidak hanya terbatas pada apa yang sungguh terjadi tetapi juga memperhatikan unsur-unsur yang paling dekat dengan apa yang sesungguhnya terjadi sejauh dapat diketahui berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Berhubung penelitian ini mengutamakan sumber dokumen, maka perlu ditegaskan mengenai tingkat kredibilitas sumber melalui kritik sumber. Untuk mengetahui keaslian sumber yang diperoleh, penulis melakukan kritik sumber yang meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk mengetahui kredibilitas informasi yang diperoleh, sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui otentisitas informasi yang diperoleh.

Sumber dokumen yang dapat memberikan informasi bagi penelitian ini antara lain, dokumen proklamasi Balibo tanggal 30 November 1975. Proklamasi Balibo mengawali peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya berhubungan dengan sejarah Timor Timur dan selanjutnya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Proklamasi Balibo kemudian diikuti dengan Deklarasi Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) tanggal 17 Desember 1975. Kedua peristiwa itu mendorong dikeluarkannya Petisi Rakyat Timor Timur tanggal 31 Mei 1976 yang berisi desakan rakyat terhadap Pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan perwujudan dari kehendak rakyat yang tertuang dalam proklamasi integrasi Timor Timur di Balibo tanggal 30 November 1975 agar dalam waktu sesingkat-singkatnya pemerintah RI menerima dan mengesahkan integrasi rakyat Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa referendum.

Atas keluarnya petisi tersebut, maka Presiden RI pada waktu itu (Soeharto) kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden RI No.113/LN tahun 1976 dan UU No.7/1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan RI dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai Propinsi ke-27.

### **3. Teknik Analisa Data**

Secara garis besar data dapat digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif sehingga teknik analisa datanya juga dapat dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif maupun teknik analisa kuantitatif. Oleh karena data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif, maka teknik

analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Data-data kualitatif yang didapatkan oleh peneliti masih berupa data mentah, untuk itu seorang peneliti perlu untuk mengadakan suatu analisis terhadap data-data tersebut. Analisis data yang dimaksud disini adalah analisis terhadap sumber sejarah atau data-data dokumen yang telah teruji kebenarannya melalui metode penafsiran yang didasarkan atas logika berpikir deduktif dan kausalistik<sup>20</sup>.

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode historis maka teknik analisa yang digunakan adalah analisa historis. Penerapan teknik analisa historis tersebut dimaksud supaya penelitian ini tidak hanya menjawab apa, kapan, dan dimana penelitian terjadi, akan tetapi juga mencoba menjelaskan gejala-gejala sejarah sebagai kausalitas. Analisa ini kemudian disajikan dalam bentuk penulisan *Diskriptif Analitis*.

### ***G. Sistematika Penulisan***

Penjabaran dari sistematika skripsi ini penulis uraikan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga dengan demikian dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dari keseluruhan isi skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut secara keseluruhan merupakan kesatuan yang saling berkaitan.

---

<sup>20</sup> W.Poespoprodjo, *Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya*, ( Bandung :Remaja Karya,1980), hal.132.

Bab Pertama mengemukakan latar belakang masalah dari studi ini, kemudian juga dikemukakan permasalahan pokok/rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian teori dan tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab Dua menyetengahkan integrasi Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah ini perlu untuk dikemukakan karena Timor Timur pernah menjadi bagian dari Indonesia meskipun saat ini telah menjadi negara yang merdeka. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang Timor Timur sebelum berintegrasi dengan NKRI, lahirnya partai-partai berkuasa hingga integrasi Timor Timur ke Indonesia dengan adanya Proklamasi Balibo tanggal 30 November 1975. Selain itu juga dikemukakan tentang Timor Timur selama berintegrasi dengan NKRI, pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI di wilayah Timor Timur, dan usaha diplomasi di forum internasional agar integrasi Timor Timur mendapat pengakuan internasional.

Bab Tiga membahas tentang Pemerintahan Transisi Timor Timur (UNTAET). Dalam bab ini dikemukakan tentang keinginan sebagian besar rakyat Timor Timur untuk berpisah dari NKRI yang disebabkan oleh semakin memburuknya keadaan dan situasi di Timor Timur, kegagalan aparat militer untuk mengembalikan keamanan di wilayah itu, disamping karena kegagalan usaha diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapat pengakuan atas integrasi rakyat Timor Timur, dan adanya tekanan dan campur tangan pihak luar dalam persoalan ini. Penyelesaian persoalan Timor Timur yang berlarut-larut menyebabkan keluarnya keputusan tentang tawaran (Ops) I dan II oleh Presiden B.J.Habibie yang menghantarkan kepada Jajak Pendapat. Selain itu juga dibahas mengenai hubungan kerjasama antara

Pemerintah RI-UNTAET sebagai pemerintahan transisi di Timor Timur sebelum Timor Timur resmi merdeka dan terbentuk pemerintahan definitif.

Bab Empat merupakan pembahasan dari permasalahan dan inti dari tema yang diambil. Dalam bab ini dideskripsikan tentang prproses kemerdekaan Timor Timur dan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Timor Timur pasca kemerdekaan Timor Timur. Sebagai fokus dan inti dari skripsi ini, maka dalam bab ini diuraikan tentang kebijakan Politik luar negeri RI dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur dan permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara (RI-Timor Timur).

Bab Lima berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian sebelumnya dan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan pokok studi ini.

## **BAB II**

### **INTEGRASI TIMOR TIMUR KE NKRI**

#### **A. Gambaran Umum Timor Timur**

##### **1. Keadaan Geografi dan Penduduk Timor Timur**

Timor Timur adalah daerah yang tidak subur dan beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dari Benua Australia. Timor Timur berada diantara Negara Indonesia dan Australia yang terletak antara 8°17`-10°22` LS dan 123° 25`-127°19` BT dengan luas wilayahnya adalah 14.989,375 km<sup>2</sup>. Disebelah Utara berbatasan dengan Selat Wetar, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor, dan sebelah Barat berbatasan dengan Daerah Tingkat I/Propinsi Nusa Tenggara Timur<sup>1</sup>.

Penduduk Timor Timur pada tahun 1975, ketika Portugal meninggalkan wilayah itu berjumlah 680.000 orang<sup>2</sup>. Kenaikan penduduk di Timor Timur menunjukkan trend pertumbuhan alami (*natural increase*) yang tidak stabil. Hal itu disebabkan karena standar hidup masyarakat yang masih sangat rendah dan kesehatan masyarakatnya belum memadai sehingga menyebabkan jumlah angka kematian yang meningkat pada waktu itu. Mayoritas penduduk Timor Timur adalah golongan pribumi (orang Timor), tetapi disamping itu ada juga golongan Tionghoa dan orang Indonesia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Departemen Penerangan RI, *Timor Timur Membangun*, hal.3.

<sup>2</sup> [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG).

<sup>3</sup> Departemen Penerangan RI, *Op.cit.*, hal.8.

Penyebaran penduduk di wilayah ini tidak merata dengan kepadatan penduduk rata-rata 40-75 orang per km<sup>2</sup>. Daerah-daerah yang padat penduduknya berada di Ainaro, Dili, Baucano, dan Uqoisu. Di Timor Timur terdapat dua belas kelompok etnis yang masing-masing kelompok mempunyai bahasa sendiri. Pada umumnya penduduk Timor Timur menggunakan bahasa Tetum sebagai bahasa pergaulan sehari-hari dan digunakan oleh sekitar 60% penduduk Timor Timur<sup>4</sup>.

Tabel I

Bahasa Daerah dan Lokasi Penyebaran

NO	Bahasa daerah	Lokasi Penyebaran
1.	Tetum	Sekitar Dili, Suai, Viqueque, dan perbatasan NTT
2.	Galoli	Sebelah Timur Dili, Metinoro, Manatatu, Laclubar
3.	Mambai	Sebelah Selatan Dili sampai Pantai Selatan (Aileu, Ermera, Ainaro, Same, dan Naubisse)
4.	Tokode	Sekitar Maubere dan Liquisa
5.	Bunak	Sekitar Bobonaro dan perbatasan NTT
6.	Kemak	Pantai Utara Baucau
7.	Makasai	Lospalos, Tutiala, Lautem
8.	Nagado	Bagian Pedalaman tengah
9.	Idate	Sebelah Utara Lacluta, sebelah Selatan Baucau
10.	Kairui	Bagian Selatan tengah
11.	Midiki(Naumiki,Nauhete)	Ambenu/Oekusi
12.	Baibenu	

Sumber: Timor Timur Membangun, Departemen Penerangan RI

---

<sup>4</sup> [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG).



## **2. Mata Pencaharian Penduduk**

Timor Timur merupakan suatu daerah yang berbukit-bukit sehingga mayoritas penduduknya hidup terpencil jauh dari kota dan pengaruh asing serta kemajuan. Mereka terikat pada ladang dan animisme sehingga sulit untuk menerima terjadinya perubahan<sup>5</sup>. Selama berabad-abad penduduk Timor Timur terdiri dari petani yang tinggal di dusun-dusun. Mereka adalah kelompok besar dari masyarakat Timor Timur, sedangkan sebagian kecil penduduk Timor Timur di pantai hidup sebagai nelayan. Perdagangan di Timor Timur dikuasai oleh orang Tionghoa. Mayoritas penduduk Timor Timur beragama Katholik. Mereka mulai meninggalkan kepercayaan animisme setelah masuknya misionaris yang datang bersama dengan Portugal.

## **3. Pendidikan**

Dalam kurun waktu antara Perang Dunia II sampai tahun 1975, sejumlah penduduk Timor Timur berhasil memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah Kolonial yang jumlahnya masih sangat sedikit. Munculnya golongan elite kecil berpendidikan pada tahun 1960-an dan 1970-an menunjukkan bahwa ketika Portugal meninggalkan Timor Timur tahun 1975, orang-orang dengan pendidikan dan aspirasi nasional ini menjadi pemimpin di wilayah ini<sup>6</sup>

Kolonial Portugal memberikan perkembangan terbatas pada koloni-koloninya, termasuk Timor Timur. Hal ini dikarenakan Portugal adalah sebuah negara miskin yang sejak tahun 1961 telah terlibat peperangan dengan koloni-koloninya yang lain. Akan tetapi setelah Perang Dunia kedua (PD II) Portugal mulai mengadakan pembangunan di Timor Timur. Portugal membangun suatu pelabuhan baru,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Rumah Sakit, Kantor-kantor Pemerintahan, dan beberapa sekolah serta Puskesmas. Pada umumnya prasarana dan pelayanan kesehatan serta sarana pendidikan yang dibangun di wilayah Timor Timur masih dalam jumlah yang terbatas.

## **B. Timor Timur Masa Pemerintahan Portugal**

Kedatangan Portugal di Timor Timur dimulai bersamaan dengan Kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kapal-kapal Portugal melakukan perjalanan ke Timor Timur untuk mengangkut kayu cendana. Kayu cendana merupakan komoditi utama dari Timor Timur yang sangat laku dijual di Eropa. Sejak abad ke-16 Portugal menganggap ekspansi, penjelajahan, dan kekuasaan mereka sebagai "*misi peradaban*" rakyat yang berada di wilayah yang telah mereka taklukkan<sup>7</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya wilayah tersebut menjadi bahan rebutan antara dua negara kolonial, yaitu Portugal dan Belanda. Setelah terjadi konflik selama berabad-abad tanpa pemenang, kedua negara tersebut berhasil mencapai kesepakatan pada tahun 1859 untuk menetapkan wilayah kekuasaan dan perbatasan masing-masing negara<sup>8</sup>. Penetapan perbatasan itu baru ditandatangani pada tahun 1915 oleh panitia gabungan Belanda-Portugal. Pada akhirnya Belanda berhasil menyingkir dari wilayah Timor Timur untuk lebih berfokus di Jawa dan Sumatra sehingga Portugal berhasil menguasai Timor Timur secara penuh.

Masa Pemerintahan Portugal sebenarnya pemberontakan dan konflik antar elite lokal sudah sering terjadi di Timor Timur, tetapi hal itu dapat dipadamkan

dengan mudah. Pada tahun 1910 terjadi pemberontakan terbesar dan terakhir yang dilakukan oleh rakyat Timor Timur sebelum Perang Dunia Kedua (PD II). Pemberontakan yang dikenal dengan “*perang Manufahi*” (1910-1912) ini dipimpin oleh seorang *liurai*<sup>9</sup> Sahe bernama Dom Boaventura. Pemberontakan itu merupakan ungkapan penentangan terhadap dominasi Portugal atas sistem ekonomi dan campur tangan dalam kehidupan rakyat Timor Timur secara umum.

Setelah Perang Dunia Kedua (PD II) konsep nasionalitas dan semangat anti kolonial di dalam diri orang-orang Timor Timur semakin kuat. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya perubahan politik di Portugal sebagai akibat dari kudeta yang dilakukan atas rezim Antonio de Oliveira Salazar dan Marcello Caetano pada tanggal 25 April 1974, disamping karena pengaruh globalisasi. Peristiwa yang dikenal dengan “Revolusi Bunga” atau “Revolusi Anyelir” (*Revolucao dos Cravos*) itu dipelopori oleh perwira-perwira yang tergabung dalam *Movimento das Forcas Armadas* (MFA)<sup>21</sup>. Kudeta ini berhasil menjatuhkan rezim otoriter, fasis, dan anti demokrasi pimpinan Salazar dan Caetano serta memberikan harapan baru bagi negeri jajahan Portugal disebelah Lautan. Didorong oleh adanya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, Spínola yang berhaluan kiri berhasil merebut kekuasaan dan melakukan dua program politik baru yaitu demokratisasi dan dekolonisasi.

Pemerintah Portugal dibawah kepemimpinan Spínola menjanjikan adanya perubahan-perubahan penting seperti terciptanya hak-hak sipil termasuk

---

<sup>7</sup> Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, (Dili: Yayasan HAK, 2000), hal.20.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.6-7.

<sup>9</sup> *Liurai* adalah pemimpin tradisional atau seorang raja, dalam Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, *Indonesia di Ambang Perpecahan?*, (Jakarta,2000), hal.239.

<sup>21</sup> Gerakan MFA dipimpin oleh Otello Saraivo de Carvalho yang didukung oleh jajaran perwira muda yang tidak puas karena perang kolonial yang berlarut-larut selama 13 tahun di Afrika sehingga Jendral Antonio de Spínola menggantikan PM.Marcello Caetano dalam (WWW.SOLIDAMOR.ORG).

demokrasi, pembubaran polisi rahasia, penghapusan sensor terhadap pers, kebebasan membentuk partai politik, dan adanya referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Hal itu memberi peluang bagi rakyat sehingga dapat membentuk Partai Politik baru untuk menampung aspirasi atau keinginan mereka. Sebelum muncul program politik Spinola, negara-negara jajahan Portugal termasuk Timor Timur hanya mengenal *Accao Nacional Popular* (ANP) sebagai satu-satunya partai yang diperbolehkan oleh rezim Caetano.

Dalam rangka pelaksanaan janji-janjinya terhadap koloninya, di Timor Timur mulai berdiri partai politik besar maupun kecil. Partai politik tersebut antara lain, Partai *Associao Popular Democratica Timorese* (Apodeti), *Uniao Democratica Timorese* (UDT), *Associao Social Democratica Timor* (ASDT), *Klibur Oan Timor Aswain* (KOTA), *Associao Democratica Integracao Timor Leste Australia* (ADITLA).

#### 1. *Associao Popular Democratica Timorese* (Apodeti)

Partai APODETI berdiri pada tanggal 27 Mei 1974. Partai ini menghendaki agar Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.

#### 2. *Uniao Democratica Timorese* (UDT)

Partai UDT berdiri pada tanggal 11 Mei 1974 dan menghendaki suatu proses otonomi progresif dibawah Portugal.

#### 3. *Associao Social Democratica Timor* (ASDT)

ASDT berdiri pada tanggal 12 Mei 1974 kemudian pada tanggal 12 September 1974 berganti nama menjadi *Frente Revolucionare do Timor Leste Independente* (Fretilin). Pergantian nama dari ASDT menjadi Fretilin terjadi setelah kedatangan para mahasiswa sebagai kader Partai Komunis Portugal (PCP). Mereka berasal dari Lisbon yang ditugaskan oleh kekuatan kiri di Portugal untuk menyusup kedalam ASDT, dan kemudian berhasil mengubah haluan partai kearah marxisme<sup>22</sup>. Fretilin adalah sebuah partai radikal yang berhaluan kiri dan menghendaki kemerdekaan penuh bagi Timor Timur.

#### 4. *Klibur Oan Timor Aswain* (KOTA)

Partai KOTA ingin mempertahankan posisi penting *liurai* atau pemimpin tradisional.

#### 5. *Associacio Democratica Integracao Timor Leste Australia* (ADITLA)

Partai ADITLA cenderung untuk berintegrasi dengan Australia.

#### 6. Partido Trabalhista atau Partai Buruh

Kemunculan partai-partai politik di Timor Timur tidak segera diikuti oleh adanya perubahan yang signifikan kearah proses penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut<sup>23</sup>. Partai-partai tersebut terpolarisasi ke dalam dua kelompok yang saling berlawanan. Kelompok pertama adalah Fretilin yang beraliran marxis-maois. Fretilin mempunyai aspirasi radikal untuk merdeka dan lepas dari penjajahan Portugal serta menolak berintegrasi dengan Indonesia sehingga dianggap sebagai kelompok pro-kemerdekaan. Kelompok kedua adalah gabungan partai Apodeti, KOTA, UDT, dan Partido Trabalhista. Kelompok ini menghendaki untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan

---

<sup>22</sup> [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG)

<sup>23</sup> Syamsuddin Haris, et.al, *Op.cit.*, hal.241.

Republik Indonesia dan sering disebut sebagai kelompok pro-integrasi. Kedua kelompok ini saling bersengketa mengenai masa depan Timor Timur<sup>24</sup>.

Partai UDT pada awal berdirinya menyatakan bergabung dengan Fretilin dan pada tanggal 20 Januari 1975 membentuk front bersama untuk menghadapi Apodeti dan kelompok pro-integrasi. Akan tetapi koalisi ini tidak bertahan lama karena ada perbedaan paham dan fusi diantara kedua partai. Hal ini menyebabkan UDT menyatakan keluar dari front bersama pada tanggal 26 Mei 1975 sehingga Fretilin berjuang sendiri dalam mempertahankan ideologinya dan memperjuangkan bagi kemerdekaan Timor Timur secara penuh.

Konflik antar partai dan gejolak politik di Timor Timur sejak saat itu semakin kuat dan berujung pada perang saudara. Pada tanggal 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta dan berhasil mengambil alih markas besar kepolisian serta berhasil menguasai sebagian wilayah Timor Timur<sup>25</sup>. Akan tetapi kekuasaan UDT tidak berlangsung lama karena Fretilin kemudian melakukan tindakan balasan. Fretilin yang mempunyai persenjataan lebih baik dan lebih modern peninggalan dari tentara Portugal semakin meningkatkan konsolidasi dan perlawanan terhadap UDT.

Persoalan dan konflik diantara kedua kelompok tersebut menjadi semakin meningkat dan berujung pada perang saudara sehingga berpengaruh terhadap keamanan di wilayah itu. Keadaan yang terjadi di Timor Timur mengakibatkan banyak korban gugur dari kedua pihak ataupun dari pihak rakyat yang tidak bersalah. Disamping itu, konflik berkepanjangan yang terjadi di Timor Timur mengakibatkan terjadinya bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Kebanyakan yang menjadi korban dalam masalah ini adalah wanita dan anak-anak. Mereka terpaksa mencari keselamatan ketempat lain dengan meninggalkan Timor Timur. Mayoritas dari mereka mengungsi untuk mencari

---

<sup>24</sup> Zacky Makarim anwar,dkk, *Hari-Hari Terakhir Timor-Timur.Sebuah Kesaksian*, (Jakarta: Sportif Media Informasindo, 2003), hal.23.

<sup>25</sup> WWW. SOLIDAMOR. ORG.

keamanan dan perlindungan ke timor Barat (Propinsi NTT) atau kedaerah perbatasan yang dirasa aman.

Menyikapi keadaan Timor Timur yang semakin kacau maka Pemerintah Portugal di Dili yang merasa tidak mampu lagi memegang kendali komando atas angkatan perang koloninya karena telah diambil alih oleh Fretilin, pada tanggal 23 Agustus 1975 meninggalkan Dili menuju Pulau Atauro di Lepas Pantai Timor. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Portugal semakin memperburuk keadaan di Timor Timur sehingga meningkatkan konflik antar partai dan elit lokal setempat.

Setelah Pemerintah Portugal meninggalkan Timor Timur, Fretilin yang telah memenangkan pertempuran dan pemilihan lokal secara *defacto* berkuasa atas wilayah Timor Timur. Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin kemudian memproklamkan kemerdekaan Timor Timur (*Declaration of Independence*) dan mengumumkan terbentuknya Pemerintah Republik Demokratis Timor Timur. Tindakan yang dilakukan oleh Fretilin mendapat reaksi keras berupa penolakan dari Komisi Nasional Dekolonisasi Portugal Pada tanggal 29 Nopember 1975. Pemerintah Portugal masih merasa sebagai penguasa yang sah di wilayah Timor Timur walaupun telah menyatakan ketidakmampuannya menjalankan pemerintahan di wilayah Timor Timur kepada PBB<sup>26</sup>. Meskipun mendapat penolakan dari Pemerintah Portugal, para pemimpin Fretilin kemudian membentuk dan memprakarsai program pembangunan dibidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan pendidikan politik.

---

<sup>26</sup> Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, *Interim Report Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur*, ( Jakarta : Balitbang Deplu RI, 2000), hal.12.

Sebelum Fretilin berkuasa, pembangunan terhadap wilayah Timor Timur telah dilakukan oleh Pemerintah Portugal. Pemerintah Portugal berusaha untuk memajukan pendidikan dan mencerdaskan rakyat Timor Timur yang masih terbelakang dan bodoh. Pada masa Gubernur Alfonso de Castro (1859-1863) memerintah, di Timor Timur dibangun sekolah untuk orang-orang Timor Timur. Sekolah tersebut pada awalnya dibangun untuk mendidik anak-anak ketua suku pribumi dan memberikan pendidikan dari kelas satu dan kelas dua. Sementara itu pada masa Gubernur Jose Celestino da Silva memerintah (1889-1908) dibangun *Sociedade Agricola Patriae Trabalho* (SAPT). Dibawah Pemerintahan da Silva, perekonomian Timor Timur mengalami tekanan secara besar-besaran, dimana pembangunan yang dilakukan menggunakan tenaga kerja secara paksa<sup>27</sup>. Pemerintah Portugal juga telah melakukan pembangunan fisik Timor Timur, seperti prasarana transportasi, fasilitas kesehatan, jaringan listrik dan telepon meskipun dalam jumlah yang terbatas. Keterbatasan tersebut dikarenakan Portugal adalah sebuah negara yang miskin di Eropa sehingga hanya dapat menyisihkan sedikit dana untuk Timor Timur.

Selama kurun waktu antara PD II dan Integrasi Timor Timur ke Indonesia, sejumlah rakyat Timor Timur telah berhasil memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah kolonial. Beberapa diantara mereka berasal dari golongan Mestizo<sup>28</sup> dan dari keluarga penguasa tradisional. Akan tetapi kebanyakan adalah orang Timor Timur asli yang memperoleh pendidikan dari seminari Katolik<sup>29</sup>. Pembangunan sekolah-sekolah di Timor Timur pada awalnya bertujuan untuk menghasilkan *katekis*<sup>30</sup> untuk gereja Katolik dan mendidik anak laki-laki para *liurai*.

---

<sup>27</sup> Helen Mary Hill, *Op.cit.*, hal.9.

<sup>28</sup> Mestizo adalah anak dari perkawinan campuran antara orang Timor Timur dengan orang Portugal, dalam (Helen Mary Hill, *Ibid.*, hal.16).

<sup>29</sup> WWW. SOLIDAMOR. ORG.

<sup>30</sup> *Katekis* adalah istilah untuk seorang guru agama, dalam (Helen Mary Hill, *Op.cit.*, hal.11).



### **C. Timor Timur Masa Pemerintahan Republik Indonesia**

Keadaan Timor Timur yang kacau karena konflik antar partai dan elit lokal yang mengarah pada perang saudara dan berlarut-larut menyebabkan Pemerintah Portugal meninggalkan Timor Timur. Sementara itu Partai-partai yang ada di Timor Timur terpolarisasi kedalam kelompok pro-kemerdekaan dan pro-integrasi yang saling berlawanan. Tindakan Fretilin (pro-kemerdekaan) yang pada tanggal 28 November 1975 mengumumkan kemerdekaan Timor Timur mendorong pihak pro-integrasi yang diwakili oleh Apodeti, UDT, KOTA, dan Partido Trabalhista serta rakyat Timor Timur untuk menyatakan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa referendum. Peristiwa yang berlangsung di Balibo pada tanggal 30 November 1975 itu dikenal dengan *Proklamasi Balibo* atau *Deklarasi Balibo*. Tindakan itu dilakukan dengan berdasar pada :

1. Pertemuan Makka, dimana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun Pemerintah Portugal mengundang mereka.
2. Kesiediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
3. Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara para Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia, yang telah menghasilkan Memorandum saling pengertian diantara mereka.
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat pertemuan Roma<sup>31</sup>.

Keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia disetujui oleh Majelis tinggi rakyat Timor Timur dalam

suatu sidang majelis di Dili. Sidang itu dihadiri oleh 28 anggota dari Kabupaten. Hadir dalam acara itu adalah para pejabat perwakilan asing di Jakarta serta para wartawan dari Dalam Negeri dan Luar Negeri yang diundang khusus ke Timor Timur<sup>32</sup>.

Sebelum Pemerintah Indonesia menerima keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia, Presiden Soeharto terlebih dahulu membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) yang diketuai oleh Arnaldo Das Reis De Araujo dan mengajukan permasalahan itu kepada DPR<sup>33</sup>. Atas desakan rakyat Timor Timur yang semakin kuat maka pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor Timur dan Kepala PSTT mengeluarkan sebuah Petisi dan menyerahkan petisi itu kepada Presiden. Atas kesungguhan hati rakyat Timor Timur maka Pemerintah RI menerima integrasi Timor Timur seperti apa adanya<sup>34</sup>. Presiden Soeharto dalam Sidang Paripurna yang diadakan di gedung Sekretariat Kabinet memutuskan untuk menerima pernyataan integrasi rakyat Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi Timor Timur secara simbolis ditandai dengan penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan salinan naskah proklamasi kepada Arnaldo dos Reis De Araujo yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Timor Timur pertama, dan Fransisco Lopez da Cruz sebagai Wakil Gubernur Timor Timur<sup>35</sup>.

Proses integrasi Timor Timur dituangkan dalam UU RI No.7 tahun 1976. UU ini mengesahkan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Hal ini diperkuat dengan TAP MPR No.VI/MPR/1978. Dengan UU RI No.7 tahun 1976 Timor Timur resmi bergabung dengan NKRI dan menjadi Propinsi ke-27 serta

---

<sup>31</sup> Proklamasi Balibo 30 November 1975 ditandatangani oleh wakil dari partai Apodeti, UDT, KOTA, dan Partido Trabalhista, dalam (Departemen Penerangan RI, *Op.cit.*, hal.4).

<sup>32</sup> *KOMPAS*, tanggal 1 Juni 1976.

<sup>33</sup> *Sinar Harapan*, tanggal 1 Juli 1976.

<sup>34</sup> *KOMPAS*, tanggal 18 Juni 1976.

menjadi suatu daerah otonomi seperti propinsi lain di Indonesia sesuai dengan Undang Undang tentang Pemerintahan yang berlaku.

Banyak reaksi yang muncul atas proses integrasi itu, baik berupa penolakan maupun dukungan. Penolakan keras datang dari Pemerintah Portugal yang masih mengklaim Timor Timur sebagai koloninya dan dari Dewan Keamanan PBB. PBB menganggap Pemerintah RI mempunyai ambisi untuk memperluas wilayah teritorial dan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan bertindak sebagai penjajah. Sementara itu dukungan terhadap Indonesia datang dari Pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Amerika secara *defacto* mengakui proses integrasi Timor Timur. Ahli sejarah dari Pakistan bernama Noor Ahmed Qudri menyatakan menghargai dan mendukung sepenuhnya politik Indonesia tentang Timor Timur<sup>36</sup>.

Keterlibatan Pemerintah RI dalam persoalan Timor Timur dimulai setelah Pemerintah Portugal meninggalkan wilayah tersebut dalam keadaan kacau dan perang saudara. Perintah RI pada tanggal 7 Desember 1975 mengirim pasukan militer ke Timor Timur dengan nama “Operasi Seroja”<sup>37</sup>. Operasi Seroja dilakukan secara terbuka setelah konflik politik di Timor Timur mencapai puncak dengan proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Fretilin<sup>38</sup>. Operasi ini berlangsung selama kurun waktu tahun 1975 sampai dengan tahun

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, tanggal 6 April 1999.

<sup>36</sup> *Sinar Harapan*, tanggal 20 Juli 1976.

<sup>37</sup> Seroja bukan bunga khas dari Timor Timur, tetapi nama nama sebuah sandi yang digunakan dengan alasan bahwa meskipun terdapat didalam lumpur akan selalu bersih dan tidak tercemar. Wawancara dengan Kol.(Purn) Ronny Muaya, Serma Sukoro, dan Koptu Haryono tanggal 12 Januari 2004 di wisma Seroja (Bekasi); wawancara dengan Serka (Purn) Untung, tanggal 24 Januari 2004 di Gayam Prit (Klaten).

<sup>38</sup> *GATRA*, Edisi No.28, Tahun VII,.1 Juni 2002, hal.53.

1978 dan diikuti oleh “Operasi Teritorial” yang bertujuan untuk membina kekuatan-kekuatan rakyat Timor Timur supaya menjadi lebih baik<sup>39</sup>. Sejak saat itu operasi militer secara besar-besaran dilakukan oleh militer Indonesia di wilayah Timor Timur. Selama Operasi Seroja dijalankan, banyak korban dari pihak militer dan rakyat pro-integrasi maupun pro-kemerdekaan. Sekitar 60.000 orang gugur dalam pertempuran tersebut dan dua kali lipat dari jumlah tersebut terluka dan mengalami cacat fisik ataupun mental. Pada saat ini sebanyak 177 orang cacat fisik eks ABRI veteran perang dalam Operasi Seroja, 19 dari AL, dan 3 orang dari AU tinggal di wisma Seroja (Bekasi)<sup>40</sup>.

### **1. Pembangunan Timor Timur**

Setelah Timor Timur resmi berintegrasi dengan NKRI dan menjadi Propinsi ke-27 maka pembangunan di wilayah itu mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembangunan dilakukan sebagai konsekuensi Pemerintah Pusat atas daerah-daerah bawahannya. Secara khusus pembangunan Timor Timur diutamakan pada pembangunan fisik dengan tujuan agar terjadi keseimbangan dan pemerataan dengan propinsi lain. Selain itu Pemerintah RI juga melakukan investasi besar di Timor Timur dalam bidang sarana dan prasarana khususnya dalam penyediaan jalan beraspal, jembatan, sekolah, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan kantor pemerintahan di Dili dan kota-kota lain yang lebih kecil di wilayah itu.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kol.(Purn) Ronny Muaya, Kopral Kepala (Purn) Lustiawan, Koptu Marinir Paryoto, tanggal 12 Januari 2004 di wisma Seroja (Bekasi).

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Sumartini, *Ibid*.

Pembangunan dan investasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI membawa kemajuan dalam berbagai bidang bagi rakyat Timor Timur. Kemajuan yang telah dicapai, antara lain dalam bidang sarana fisik pemerintah dalam tahun 1979/1980 berhasil membangun sarana irigasi Sungai Seacal di Kabupaten Baucau dan irigasi Sungai Balobo di Kecamatan Meliana, Kabupaten Bobonaro. Selain itu mengingat fungsi jalan sangat penting untuk melancarkan arus perekonomian masyarakat maka pemerintah melakukan rehabilitasi jalan-jalan yang rusak dan melakukan pengaspalan jalan<sup>41</sup>. Pemerintah RI juga melakukan pembangunan dalam bidang Pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, pada tahun anggaran 1979/1980 pemerintah berhasil membangun 150 unit Sekolah Dasar (SD) dan 150 unit rumah Kepala Sekolah, serta penambahan peralatan sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengusahakan adanya kursus-kursus bagi para guru. Disamping itu, dilakukan berbagai kegiatan pramuka, rehabilitasi dan pembangunan sarana olah raga, pengadaan alat-alat olah raga, serta pembinaan seni budaya<sup>42</sup>. Untuk peningkatan kualitas kesehatan di Timor Timur dilakukan dengan membangun beberapa sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Selain itu pemerintah menambah jumlah tenaga medis dan ahli bidang kesehatan dari daerah atau propinsi lain. Sementara itu dalam bidang keagamaan pemerintah banyak mendirikan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid atau musholla.

Disamping pembangunan fisik, Pemerintah Indonesia juga memperhatikan bidang lain terutama bidang ekonomi. Secara ekonomi dapat dikatakan bahwa

---

<sup>41</sup> Departemen Penerangan RI, *Op.cit.*, hal. 76.

sebenarnya banyak kemajuan yang telah didapat oleh Timor Timur selama berintegrasi dengan Indonesia. Pada awal integrasi terjadi peningkatan jumlah produksi pertanian. Dalam tahun 1979, produk pertanian mencapai 15.000 ton gabah kering. Pada tahun 1980 meningkat menjadi 23.537 ton gabah kering<sup>43</sup>. Demikian juga tingkat produksi tanaman pertanian lain terutama sayur-sayuran, ubi-ubian dan palawija.

Usaha Pemerintah RI dalam melakukan pembangunan dan menanam investasi di Timor Timur mengalami hambatan karena ada banyak persoalan lain yang harus segera diatasi pada awal integrasi Timor Timur. Persoalan-persoalan tersebut yang paling utama adalah kemiskinan dan kelaparan, serta pemukiman kembali sebagian besar rakyat Timor Timur akibat perang saudara yang terjadi berlarut-larut. Mereka mengungsi ketempat lain terutama ke Timor Barat (Propinsi NTT) untuk mencari perlindungan dan keselamatan. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian yang disediakan oleh Pemerintah setempat. Banyak dari para pengungsi yang meninggal karena wabah penyakit dan kelaparan akibat kekurangan gizi. Sejak tahun 1978 kemiskinan di Timor Timur meningkat, kekurangan gizi dan pangan semakin meluas<sup>44</sup>. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rp 920 juta lebih bantuan untuk para pengungsi disamping bantuan berupa pangan, bahan bangunan, dan alat-alat pertanian<sup>45</sup>.

Praktek pembangunan dari Pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik serta mengabaikan faktor sejarah, sosial, dan kultural lokal menjadi “*bom waktu*” bagi Pemerintah. Bom waktu yang merupakan akumulasi dari kekecewaan rakyat Timor Timur pro-kemerdekaan berpuncak pada kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang cenderung menggunakan pendekatan sentralisasi dan penyeragaman berakibat pada teralienasinya sebagian rakyat dari lingkungan mereka. Keadaan seperti itu melahirkan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 98-99.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal.123.

<sup>44</sup> WWW. SOLIDAMOR. ORG.

<sup>45</sup> KOMPAS, tanggal 1 Juli 1976.

situasi yang menguntungkan bagi gerakan perlawanan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selama kurun waktu sekitar 23 tahun berintegrasi dengan Indonesia, konflik di Timor Timur tidak pernah selesai.

Persoalan lain yang penting adalah integrasi Timor Timur kedalam NKRI yang tidak diakui oleh PBB. Berhubungan dengan masalah tersebut maka sejak tahun 1976 Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi di forum internasional dengan tujuan agar integrasi Timor Timur dapat diakui oleh dunia internasional.

## **2. Diplomasi Pemerintah RI di Forum Internasional**

Penyelesaian persoalan integrasi Timor Timur ke dalam NKRI melalui cara diplomasi dalam Sidang Majelis Umum PBB berlangsung lama sehingga PBB kemudian mengambil tindakan untuk menunda permasalahan tersebut. PBB berusaha untuk mengalihkan pembahasan persoalan ini kedalam forum pertemuan dialog segitiga (*Tripartite Talks*) antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Luar Negeri Portugal, dan Sekjen PBB sebagai penengah. Pertemuan segitiga itu membahas penyelesaian persoalan Timor Timur yang telah dilakukan beberapa kali sejak tahun 1992 sampai 1996.

Pertemuan segitiga yang telah dilakukan tidak memperlihatkan hasil yang menunjukkan bahwa masalah Timor Timur akan segera selesai. Hal itu disebabkan tidak ada titik temu antara pihak Indonesia dan Portugal yang tetap mempertahankan prinsip dasar masing-masing. Pemerintah Portugal menuntut pelaksanaan "*act of self determination*" atau penentuan nasib sendiri harus dilakukan di Timor Timur melalui referendum. Sementara Indonesia menolak diadakan referendum karena secara prinsip rakyat Timor Timur telah menentukan nasibnya sendiri pada tahun 1976 sesuai dengan kondisi sosial dan tradisi mereka<sup>46</sup>. Kedua negara (Indonesia dan Portugal) juga melakukan beberapa pertemuan informal untuk membahas penyelesaian persoalan Timor Timur.

---

<sup>46</sup> Tim peneliti Balitbang Deplu RI, *Op.cit.*, hal.27.

Tabel II

Hasil Pemungutan Suara di Majelis Umum PBB (dalam negara)

Tahun	Pro Portugal	Kontra Portugal	Abstain	Absen
1975	72	10	43	18
1976	68	20	49	8
1977	67	26	47	7
1978	59	31	44	14
1979	62	31	45	13
1980	58	35	46	14
1981	54	42	46	14
1982	50	46	50	10

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri

Pertemuan informal pertama dilakukan pada tanggal 14-17 Desember 1993. Pertemuan itu merupakan pertemuan rekonsiliasi pertama dan dilakukan di London yang menghasilkan semangat rekonsiliasi yang dikenal dengan “*semangat London*”, yaitu semangat kedua pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Timor Timur disegala bidang<sup>47</sup>.

Cara lain yang diusahakan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengadakan pertemuan antar masyarakat Timor Timur sendiri dalam forum AIETD<sup>48</sup>. Para peserta AIETD adalah sebagai pribadi dan tidak mewakili latar belakang politik ataupun jabatan fungsional mereka.

Usaha diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI mengenai persoalan Timor Timur di forum internasional pada awalnya berjalan cukup baik. Akantetapi karena terjadi perubahan cepat dalam situasi internasional, terutama pasca Perang Dingin (*cold war*) dan sejalan dengan perkembangan

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.25.

<sup>48</sup> AIETD merupakan forum yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Timor Timur warga negara Indonesia dan tokoh-tokoh Timor Timur pro-kemerdekaan di perantauan.



teknologi informasi yang maju pesat maka tema Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, dan keamanan lingkungan hidup lebih mendominasi politik internasional<sup>49</sup>. Oleh karena dipengaruhi juga terjadinya insiden Santa Cruz maka isu Timor Timur lebih merupakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) daripada menjadi isu politik sehingga usaha diplomasi yang telah dilakukan tidak bermanfaat.

Insiden Santa Cruz terjadi pada hari minggu tanggal 12 November 1991 disekitar tanah pemakaman Santa Cruz di Dili. Insiden tersebut terjadi setelah para demonstran menghadiri misa di Gereja Motael. Mereka menabur bunga di makam Sebastiao Gomes Rangel (16 tahun)- seorang aktivis pro-kemerdekaan yang menjadi korban kerusuhan yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1991 di depan Gereja Motael<sup>50</sup>. Banyak korban yang gugur dalam peristiwa tersebut, baik dari pihak ABRI (TNI/POLRI), demonstran, bahkan wartawan asing. Korban meninggal sebanyak 19 orang dan 91 orang luka-luka termasuk 2 orang kritis, sementara itu sebanyak 42 orang ditahan. Korban meninggal yang merupakan orang asing (WNA) adalah Kamel bin Ahmad- seorang wartawan warga negara Selandia Baru yang sedang melakukan reportasi di Timor Timur, sedangkan warga asing yang mengalami luka-luka adalah Ami Goodman dari The New Yorker dan Alan Nairn dari jaringan radio di New York<sup>51</sup>.

Insiden Santa Cruz mendapat perhatian masyarakat internasional karena terjadi bersamaan dengan kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di

---

<sup>49</sup> Sabam Siagian, “ Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Timor Timur Pasca Pemisahan dan Menjaga Integritas Bangsa”, makalah dalam *Forum Dialog VII*, (Bandung: Badan Litbang Deplu, tanggal 6-8 Juli 2000), hal.3.

<sup>50</sup> *TEMPO*, Edisi November 1991, hal.23.

Timor Timur yang diketuai oleh Professor Koijmans. Hal ini menyebabkan persoalan Timor Timur kembali menjadi pusat perhatian dunia internasional. Peristiwa tersebut berakibat juga pada banyak protes dan kritik serta campur tangan yang ditujukan kepada Pemerintah RI sehingga memperburuk citra dan posisi Pemerintah RI dalam pergaulan internasional. Insiden tersebut semakin mempersulit usaha diplomasi Pemerintah RI di forum internasional, bahkan peristiwa itu dijadikan sebagai alat bagi negara-negara lain yang memiliki kepentingan (*visted interest*) di Timor Timur untuk secara terus menerus memojokkan Pemerintah RI dalam masalah HAM dan menekan Pemerintah RI untuk melepas wilayah tersebut<sup>52</sup>. Hal-hal tersebut menjadi pendorong munculnya keinginan dari sebagian rakyat Timor Timur untuk berpisah dari NKRI. Keinginan mereka semakin kuat dan kesempatan luas terbuka bagi kemerdekaan Timor Timur setelah Presiden B.J.Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat (1998-1999) mengambil langkah berani dengan mengeluarkan suatu tawaran (Opsi) sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur.

---

<sup>51</sup> *KOMPAS*, tanggal 15 November 1991.

**BAB III**  
**PEMERINTAHAN TRANSISI TIMOR TIMUR**  
**( UNTAET)**

**A. Lepasnya Timor Timur dari NKRI**

Berakhirnya rezim pemerintahan otoritarian Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa telah membuka cakrawala baru bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Gerakan reformasi dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan dilakukan pada saat terjadi krisis multidimensi di Indonesia. Dengan momentum reformasi itu, persoalan status Timor Timur yang menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional diharapkan memperoleh kejelasan. Penyelesaian masalah Timor Timur ini dilanjutkan oleh B.J Habibie dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian status khusus dengan otonomi luas dalam sebuah rapat kabinet pada tanggal 9 Juni 1998.

**1. Tawaran ( Opsi) Penyelesaian Persoalan Timor Timur**

Konsep Otonomi Luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Setelah insiden Santa Cruz, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sudah berusaha menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik yang dapat dilakukan<sup>53</sup>. Seruan tersebut disampaikan setelah surat usulan tentang referendum yang pernah

---

<sup>52</sup> Tim peneliti Balitbang Deplu RI, *Op.cit.*, hal.24.

disampaikannya kepada Sekretaris Jendral PBB-Javier Perez de Cuellar mendapat reaksi keras dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Uskup Belo mengungkapkan pengalamannya selama bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan yang mengalami ancaman sehingga ia meminta bantuan pengamanan dari internasional. Hal itu dilakukannya dengan alasan di Timor Timur sudah tidak ada tempat untuk melakukan pengaduan karena ABRI yang dianggap sebagai pelindung telah melakukan hal sebaliknya berupa tindakan ancaman dan kekerasan<sup>54</sup>. Akan tetapi semua usulan mengenai pemberian otonomi luas di Timor Timur tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia pada saat itu karena posisi dan sikap pemerintah sangat jelas yang menganggap bahwa integrasi Timor Timur merupakan hal yang telah final dan tidak bisa ditawar<sup>55</sup>.

Pemberian otonomi luas menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir yang adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional. Cara ini menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu cara penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana, dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan<sup>56</sup>. Tawaran dari pemerintah berupa Otonomi luas tersebut memberi kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk dapat memilih Kepala Daerahnya sendiri, menentukan kebijakan daerah sendiri, dan dapat mengurus daerahnya sendiri. Keputusan untuk mengeluarkan Opsi mengenai otonomi luas di Timor Timur diambil oleh Presiden B.J.Habibie karena

---

<sup>53</sup> Garry van Klinken, *Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur*, ( Jakarta: ELSAM, 1996), hal.23-24.

<sup>54</sup> *Buletin Kay Rala Lian*, Edisi VI/Mei/1997.

<sup>55</sup> Zacky A.Makarim, dkk, *Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*, ( Jakarta: Sportif Media Informasindo, 2003), hal.33.

<sup>56</sup> Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, *Indonesia di Ambang Perpecahan?*, ( Jakarta, 2000, hal. 267.

integrasi wilayah itu ke Indonesia selama hampir 23 tahun tidak mendapat pengakuan dari PBB.

Pemerintah Portugal maupun PBB menyambut positif tawaran status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada saat Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberian status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan berlangsungnya kembali Perundingan “*Senior Official Meeting*” (SOM) atau Pejabat Senior dibawah tingkat menteri di New York pada tanggal 4 –5 Agustus 1998. Dari hasil dialog tersebut ketiga pihak sepakat untuk membahas dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi luas sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur tanpa merugikan posisi masing-masing pihak. Pada saat yang sama Sekretaris jendral PBB juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan berbagai tokoh masyarakat Timor Timur yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan perundingan yang telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan naskah persetujuan tentang rancangan otonomi luas pada pertemuan dialog segitiga (*tripartite talks*) tersebut. Tanggapan positif mengenai rancangan otonomi luas juga diberikan oleh banyak tokoh dan kalangan moderat Timor Timur. Hal ini antara lain terlihat dalam diskusi yang diprakarsai oleh *East Timor Study Group* (ETSG)<sup>57</sup>. Mereka melihat konsep otonomi luas tersebut di dalam kerangka suatu masa transisi yang cukup lama sebelum suatu penyelesaian menyeluruh melalui referendum diadakan. Otonomi luas tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Republik Indonesia, bisa juga tidak diperlukan apabila masyarakat sudah puas dengan pilihan tersebut.

---

<sup>57</sup> ETSG merupakan suatu lembaga yang beranggotakan para intelektual yang berasal dari Timor Timur, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam ( Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, *Ibid.*, hal. 268).

Sebagaimana otonomi yang telah diterapkan di berbagai negara lain, wewenang Pemerintah Daerah Timor Timur adalah mengatur berbagai aspek kehidupan kecuali aspek pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Wewenang pemberian otonomi luas terhadap masyarakat Timor Timur ini jika dilihat dan ditinjau terdapat perbedaan dan jauh lebih luas daripada kebebasan yang diberikan kepada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Tindakan ini diambil oleh pemerintah mengingat Timor Timur memiliki kekhususan sejarah dan sosial budaya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih bersifat khusus<sup>58</sup>. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur, Presiden B.J.Habibie mengajukan Opsi II pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi II menyebutkan bahwa jika rakyat Timor Timur menolak Opsi I tentang pemberian otonomi luas maka Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan kewenangannya kepada MPR hasil pemilu bulan Juni 1999 untuk memutuskan kemungkinan melepaskan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara terhormat, baik-baik, dan damai, serta secara konstitusional.

Usulan mengenai Opsi II disampaikan oleh Presiden B.J.Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia-John Howard kepada Presiden RI tanggal 19 Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Di dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui kedaulatan RI atas Timor Timur. Usulan

---

<sup>58</sup> Arsip DPR RI mengenai Rancangan Penjelasan Atas Undang Undang RI tahun 1976.

Presiden B.J.Habibie kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Januari 1999 dan disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J.Habibie akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia akan terbebas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur, maupun tekanan-tekanan internasional dan kritik dari negara lain. Tekanan-tekanan internasional, khususnya berasal dari PBB yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Selain itu keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan berbagai permasalahan ekonomi dan politik dalam negeri pada saat. Kebijakan Presiden B.J.Habibie mengenai Opsi II merupakan suatu usaha untuk membangun citra baik sebagai pemerintahan transisi yang reformis dan demokratis serta merupakan suatu usaha untuk membangun kembali perekonomian negara yang kacau sebagai akibat dari krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, keputusan keluarnya Opsi II juga didasari oleh sikap Presiden B.J. Habibie yang menghormati Hak Asasi Manusia(HAM) dan memberikan kebebasan di atas prinsip kemerdekaan kepada setiap rakyat Indonesia<sup>59</sup>.

Pengambilan keputusan terhadap penyelesaian persoalan Timor Timur menurut beberapa pakar dan pengamat politik Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang gegabah. Hal itu dilandasi alasan bahwa keadaan situasi di dalam negeri Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit terbukti dengan: pertama, krisis ekonomi-moneter yang sedang dialami oleh negara Indonesia sejak tahun 1997 dan berdampak kedalam politik Indonesia sehingga menimbulkan krisis

---

<sup>59</sup> Lela E.Madjiah, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, ( Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2002), hal.236.

multidimensional yang ditandai dengan jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto. Berakhirnya kekuasaan pemimpin Orde Baru atas desakan para mahasiswa dan rakyat Indonesia melalui gerakan reformasi secara berkesinambungan menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat dalam negeri terhadap pemerintah sehingga menimbulkan “*krisis kepercayaan terhadap pemerintah*”. Keadaan pemerintah yang sedang mengalami banyak persoalan dimanfaatkan oleh pihak-pihak sparatis Timor Timur yang menuntut diadakannya referendum sebagai sarana penentuan nasib rakyat Timor Timur.

Tuntutan tersebut mendapat banyak simpati dari kelompok-kelompok masyarakat lain di tanah air dan dunia internasional. Dari dalam negeri dukungan diberikan oleh kelompok pembela HAM dan demokrasi, seperti LSM dan Komnas HAM. Sedangkan dari internasional adalah Amerika dan Australia yang selalu mengontrol dan melakukan provokasi kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur. Kedua negara itu bersama-sama dengan PBB selalu memantau perkembangan yang terjadi di Timor Timur. Perubahan sikap kedua negara ini dipengaruhi oleh perkembangan global dan isu-isu internasional tentang demokratisasi dan HAM.

Kedua, terjadi pergeseran posisi dasar Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 1998 pada saat Presiden B.J Habibie mengumumkan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan “status khusus dengan Otonomi luas”.

Pemberian status ini dianggap sebagai formula dan usaha untuk mencapai penyelesaian politik dalam masalah Timor Timur. Akan tetapi pada tanggal 27 Januari 1999 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna bidang Politik dan Keamanan mengenai pemberian “Opsi II” yang berhubungan dengan pemberian tanggapan atas otonomi luas apabila pemberian status khusus itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Timor



Timor maka jalan yang akan diambil selanjutnya adalah Pemerintah Republik Indonesia akan mengusulkan kepada Sidang Umum MPR hasil Pemilu yang baru terpilih agar Timor Timur dapat berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara baik-baik, damai, terhormat, tertib, dan konstitusional<sup>60</sup>.

Keluarnya Opsi II mengejutkan bagi banyak pihak dan tidak diterima secara menyeluruh di Indonesia. Salah satu pihak yang sangat menentang Opsi II adalah tentara Indonesia (ABRI/TNI). Mereka mengkhawatirkan bahwa pemisahan Timor Timur dapat membawa akibat yang merugikan bagi persatuan dan keamanan di wilayah itu<sup>61</sup>. Ancaman terhadap instabilitas keamanan di Timor Timur seperti yang dikhawatirkan menjadi kenyataan, terbukti dengan kekerasan yang terjadi disana. Meningkatnya intensitas kekerasan dan ketegangan di Timor Timur disebabkan oleh kedua kelompok (pro-integrasi dan pro-kemerdekaan) saling melakukan teror dan intimidasi. Kelompok pro-kemerdekaan yang mendapat “angin segar” atas keputusan pemberian Opsi II semakin menunjukkan sikap permusuhan terhadap kelompok pro-integrasi dan Pemerintah Republik Indonesia. Tindak kekerasan tidak hanya menghantui rakyat setempat tetapi juga masyarakat pendatang, baik para pedagang maupun aparat pemerintah yang bertugas dan ditugaskan di wilayah itu. Selain itu kemunculan berbagai kelompok milisi pro integrasi yang tidak dapat dicegah menjadi faktor pendukung bagi

---

<sup>60</sup> KOMPAS, tanggal 29 Januari 1999; Wiranto, *Selamat Jalan Timor Timur. Pergulatan Menguk Kebenaran*, ( Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia, 2002), hal.85.

<sup>61</sup> PBB, *Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*, ( New York: Deppen Publik PBB, 2000), hal.9.

meningkatnya intensitas konflik di wilayah yang pernah menjadi propinsi ke-27  
Indonesia<sup>62</sup>.

Keadaan di Timor Timur, khususnya Dili semakin kacau setelah pemimpin Gerakan Perlawanan Rakyat Timor Timur (*CNRT/Concelho Nacional Resistencia Timorese*)- Xanana Gusmao pada tanggal 5 April 1999 mengumumkan perang terhadap Pemerintah RI dan TNI. Pertikaian dan konflik, serta tindak kekerasan yang sering terjadi antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menyebabkan Pemerintah RI khususnya TNI/POLRI melakukan usaha-usaha rekonsiliasi untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Usaha tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Timor Timur.

Usaha yang telah dilakukan oleh TNI/POLRI antara lain adalah dengan memfasilitasi suatu perjanjian damai yang diselenggarakan di Diosis Keuskupan Dili pada tanggal 21 April 1999. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Menhankam/Panglima TNI Jendral Wiranto, Komnas HAM, dan Gereja Katholik di Timor Timur dan menghasilkan kesepakatan tentang penghentian permusuhan dan penciptaan perdamaian<sup>63</sup>. Menindaklanjuti perjanjian damai tersebut maka TNI/POLRI dan Komnas HAM kemudian membentuk Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS). Unsur-unsur keanggotaan KPS terdiri dari perwakilan Fretilin, kelompok pro-integrasi, TNI/POLRI, Komnas HAM, dan perwakilan Pemerintah RI serta wakil dari UNAMET<sup>64</sup>. Tugas dari KPS antarlain adalah (1) memonitor terjadinya pelanggaran-pelanggaran serta dampak perjanjian damai; (2) melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menghentikan segala bentuk

---

<sup>62</sup> Nugroho Wisnu Murti, dalam ([WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG)).

<sup>63</sup> Tono Suratman, *Untuk Negaraku. Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.70.

permusuhan, intimidasi, dan kekerasan; (3) menerima pengaduan masyarakat tentang pelanggaran yang terjadi di Timor Timur, baik yang dilakukan oleh aparat maupun pihak-pihak yang bertikai; (4) KPS bersama UNAMET akan menyusun suatu aturan main (*code of conduct*) untuk mengatur perilaku pada masa sebelum, selama, dan setelah konsultasi yang harus ditaati oleh semua pihak<sup>65</sup>. Pada tanggal 18 Juni 1999 TNI/POLRI berhasil memfasilitasi kesepakatan antara *Concelho Nacional Resistencia Timorese* (CNRT) dan Falintil dengan pihak pro-integrasi untuk menyambut Jajak Pendapat di Timor Timur. TNI/POLRI juga berhasil menjadi fasilitator penyelenggaraan Pertemuan Dare II di Jakarta pada tanggal 25-30 Juni 1999<sup>66</sup> yang membahas empat masalah pokok, yaitu rekonsiliasi, Jajak Pendapat, keamanan, dan masalah politik.

Hasil dari usaha-usaha tersebut tidak sesuai dengan harapan karena kedua pihak yang bertikai sering melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal itu disebabkan oleh kuatnya rasa dendam diantara mereka. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kekacauan di Timor Timur. Ketegangan diantara kedua pihak semakin meningkat setelah dilakukan Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh UNAMET. Hasil jajak Pendapat yang diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999 menunjukkan bahwa sebesar 78,5% atau sekitar 344.580 orang menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, sedangkan sebanyak 21,5%

---

<sup>64</sup> Wiranto, *Op.cit.*, hal.144.

<sup>65</sup> Zacky A.Makarim, *Op.cit.*, hal.197.

<sup>66</sup> Pertemuan Dare II adalah lanjutan dari pertemuan Dare I yang berlangsung pada bulan September 1998. Dare adalah nama suatu wilayah perbukitan yang indah di Dili Barat, dalam ( Lela E.madjiah, *Op.cit.*, hal.66); Tono Suratman, *Op.cit.*, hal.65.

atau sekitar 94.388 orang menerima Opsi I. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka berpisah dari NKRI<sup>67</sup>.

Penyelenggaraan Jajak Pendapat dilakukan oleh UNAMET sebagai badan khusus yang didirikan oleh PBB. Badan ini mempunyai misi dan kewajiban untuk memantau keadaan Timor Timur serta menyelenggarakan Jajak Pendapat dengan bersikap netral. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh Menteri luar negeri Ali Alatas ( RI) dan Menteri luar negeri Jaime Gama ( Portugal) dengan mengikutsertakan wakil PBB Jamsheed Marker, serta memperoleh perhatian langsung dari Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan<sup>68</sup>. Kesepakatan ini diperoleh dalam sebuah dialog yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 1999 di New York (AS) yang menghasilkan “Persetujuan New York”. Persetujuan ini menghasilkan tiga hal yang disepakati dan ditandatangani, serta satu lampiran yang berisi konsep status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur. Ketiga hal yang disepakati adalah (1) kesepakatan tentang persetujuan RI-Portugal mengenai masalah Timor Timur; (2) persetujuan bagi modalitas atau tatacara Jajak Pendapat melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan jujur serta adil; (3) persetujuan tentang pengaturan keamanan Jajak Pendapat. Kesepakatan tersebut diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1236 tahun 1999 dalam pertemuan Dewan Keamanan ke 3998 pada tanggal 7 Mei 1999<sup>69</sup>.

## **2. Jajak Pendapat**

Jajak Pendapat merupakan suatu cara bagi penyelesaian persoalan Timor Timur yang muncul dari tawaran (Opsi) Presiden B.J.Habibie. Sesuai dengan

---

<sup>67</sup> Lela E.Madjiah, *Op.cit.*, hal.236.

Perjanjian New York, Jajak Pendapat diselenggarakan oleh PBB. Pelaksanaan Jajak Pendapat terdiri dari tujuh tahapan, yaitu (1) Tahap Perencanaan Operasi dan Penggelaran, tanggal 10 Mei-15 Juni 1999; (2) Tahap Sosialisasi/penerangan Umum, tanggal 10 Mei-15 Agustus 1999; (3) Tahap Persiapan dan Registrasi, tanggal 13 Juni-17 Juli 1999; (4) Tahap Pengajuan keberatan atas daftar peserta Jajak Pendapat, tanggal 18-23 Juli 1999; (5) Tahap Kampanye Politik, tanggal 20 Juli sampai tanggal 5 Agustus 1999; (6) Tahap Masa Tenang, tanggal 6 dan 7 Agustus 1999; (7) Tahap Pemungutan suara, tanggal 8 Agustus 1999. Dalam pelaksanaan ada beberapa tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana sehingga mempengaruhi seluruh proses Jajak Pendapat. Tahap-tahap yang mengalami perubahan waktu pelaksanaan yaitu Tahap Persiapan dan Registrasi dilakukan tanggal 16 Juli 1999 karena ada kesulitan dalam penyelenggaraan peralatan, logistik, dan keterbatasan personil. Registrasi dilakukan tanggal 6 Agustus 1999 untuk wilayah Timor Timur dan 8 Agustus 1999 untuk wilayah diluar Timor Timur. Masa Kampanye juga mengalami kemunduran sehingga dimulai tanggal 11-27 Agustus 1999. Jajak pendapat diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999. Kemunduran penyelenggaraan Jajak Pendapat selain karena perubahan waktu pelaksanaan tahapan sebelumnya, juga karena alasan keamanan dan logistik<sup>70</sup>. Perubahan waktu penyelenggaraan Jajak Pendapat disahkan dengan resolusi PBB No.1262 tanggal 27 Agustus 1999<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> *KOMPAS*, tanggal 25 April 1999.

<sup>69</sup> Zacky A.Makarim. *Op.cit.*, hal.197.

<sup>70</sup> *KOMPAS*, tanggal 5 Juni 1999.

<sup>71</sup> Zacky A.Makarim, *Op.cit.*, hal.199.

Jajak Pendapat dilakukan secara serentak di lebih dari 700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 dan diikuti oleh sekitar 600.000 orang Timor Timur yang berada di wilayah ini. Disamping itu juga diikuti oleh sekitar 30.000 orang Timor Timur yang berada di daerah lain (Denpasar, Jakarta, Makasar, Surabaya, Yogyakarta) serta di Luar Negeri (AS, Australia, Macau, Mozambik, Portugal) yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih<sup>72</sup>. Syarat bagi orang-orang yang berhak mengikuti jajak pendapat adalah (1) telah berumur 17 tahun; (2) lahir di Timor Timur; (3) lahir diluar Timor Timur, tetapi memiliki sedikitnya satu orang tua yang lahir di Timor Timur; (4) menikah dengan seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Sementara itu hasil jajak pendapat diumumkan oleh PBB tanggal 4 September 1999.

Hasil Jajak Pendapat menunjukkan bahwa sekitar 78,5% atau sekitar 344.580 orang Timor Timur memilih merdeka dan menolak status khusus dengan otonomi luas yang ditawarkan Pemerintah dan 21,5 % atau sekitar 94.388 orang menerima tawaran tersebut. Dengan hasil tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia melalui MPR hasil Pemilu tahun 1999 kemudian menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur dari NKRI dan mengembalikan status wilayah itu seperti sebelum berintegrasi. Hasil tersebut pada satu sisi sangat menggembirakan kelompok pendukung anti-integrasi, sedangkan pada sisi lain mengecewakan kelompok pro-integrasi

---

<sup>72</sup> KOMPAS, tanggal 7 Mei 1999.

dan para prajurit TNI/POLRI yang telah berjuang mempertahankan integrasi Timor Timur<sup>73</sup>.

Bersamaan dengan pengumuman hasil Jajak Pendapat, keadaan di Dili ( Ibu kota Timor Timur) semakin kacau. Pihak yang kalah dan kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan tindak kekerasan, teror, dan intimidasi terhadap para pendukung anti-integrasi. Pertikaian dan konflik antara kedua pihak semakin meningkat setelah masing-masing pihak menyatakan siap untuk perang. Pada tanggal 4 September terjadi pertikaian antara kedua kelompok di Pelabuhan Dili. Kelompok anti-integrasi yang terdesak bersembunyi di rumah Uskup Belo sehingga menyebabkan massa dari kelompok pro-integrasi marah dan membakar salah satu bangunan di Keuskupan. Peristiwa kekerasan juga terjadi pada tanggal 5 September 1999 di Keuskupan Diosis Dili dan mengakibatkan banyak orang meninggal. Pertikaian juga terjadi di kantor CNRT di Mascaronhos, Dili Barat. Dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap kantor CNRT oleh massa kelompok pro-integrasi. Peristiwa- peristiwa tersebut menyebabkan keadaan di Timor Timur semakin tidak aman sehingga mengakibatkan banyak orang mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman. Banyak dari mereka yang mencari perlindungan ke Mapolda Timor Timur dan daerah Timor Barat (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Timur.

Keadaan di Timor Timur yang kacau menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya TNI/POLRI mendapat protes dan tekanan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, tanggal 6 September 1999.

dari masyarakat internasional. TNI/POLRI dianggap telah gagal menjalankan amanat sesuai Persetujuan New York. Banyak negara, seperti AS, Australia, Inggris, Jepang, Perancis, Portugal, Selandia baru, dan Singapura mendesak Pemerintah Republik Indonesia supaya dapat menciptakan keadaan yang lebih aman dan tertib di Timor Timur<sup>74</sup>. Tekanan juga dilakukan oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Kedua organisasi ini mengancam akan menghentikan bantuan apabila Pemerintah Republik Indonesia gagal memperbaiki keadaan di Timor Timur. Selain itu DK PBB juga mengeluarkan sebuah peringatan keras atau ultimatum kepada Pemerintah Republik Indonesia. PBB memberikan peringatan apabila dalam waktu 48 jam aparat keamanan (TNI/POLRI) tidak berhasil mengembalikan keamanan dan ketertiban Timor Timur maka Pemerintah Republik Indonesia harus siap untuk menerima bantuan internasional<sup>75</sup>.

Banyaknya tekanan dari masyarakat internasional menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan darurat di Timor Timur. Berdasar Undang Undang No.23 tahun 1959 tentang Keadaan Darurat maka mulai tanggal 7 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Darurat Militer di Timor Timur. Pemberlakuan keadaan Darurat Militer (PDM) memberi landasan hukum dan wewenang bagi TNI/POLRI untuk bertindak lebih tegas dalam menindak kerusuhan, kebrutalan, dan pelanggaran hukum di wilayah itu

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, tanggal 9 September 1999.

<sup>75</sup> *Ibid.*, tanggal 8 September 1999.



supaya ketertiban dapat pulih<sup>76</sup>. Keputusan ini didasarkan pada Keppres No.107/Tahun 1999 dan Lembaran Negara No.152 serta mendapat persetujuan dari Portugal dan Sekjen PBB. Oleh karena hasil yang dicapai dari PDM tidak sesuai dengan harapan maka pada tanggal 24 September kebijakan ini diakhiri. Kegagalan kebijakan PDM ini menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia kemudian bersedia menerima pasukan multinasional penjaga perdamaian internasional dari negara lain untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.

Setelah terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, maka Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi No.1264 tahun 1999 yang disetujui secara aklamasi oleh 15 anggota DK PBB<sup>77</sup>. Berdasar Bab VII Piagam PBB, maka DK PBB memberi wewenang pembentukan pasukan multinasional (*Multinational Force/MNF*) yaitu INTERFET (*International Force East Timor*). Badan ini bertugas untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, melindungi dan mendukung UNAMET dalam melakukan tugasnya, dan memfasilitasi operasi bantuan keamanan PBB serta harus bersikap netral<sup>78</sup>. Badan ini secara resmi bertugas untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur dari TNI/POLRI. Pada tanggal 20 September 1999 pasukan INTERFET yang dipimpin oleh Mayor Jendral Peter Cosgrove tiba di Timor Timur untuk melakukan Operasi Pemulihan (*Operation Stabilise*). Seperti halnya dengan UNAMET, INTERFET juga sering bersikap tidak netral dan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, tanggal 16 September 1999.

berpihak pada kelompok anti-integrasi. Setelah keadaan di Timor Timur semakin baik dan ketegangan antara kedua pihak yang bertikai berkurang maka pasukan INTERFET ditarik mundur secara perlahan-lahan dan digantikan oleh UNTAET.

## B. Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNTAET

Tanggal 20 Oktober 1999 MPR melakukan Sidang Pleno untuk membahas masalah Jajak Pendapat (referendum) di Timor Timur. Dalam pertemuan itu MPR mengakui hasil dari Jajak Pendapat yang telah dilakukan dan membatalkan undang-undang pengintegrasian Timor Timur ke- NKRI. Kemerdekaan Timor Timur secara konstitusional diperkuat dengan Tap MPR No.V/MPR/1999. Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas masa depan Timor Timur. Pasca berakhirnya Pemerintahan Republik Indonesia atas Timor Timur, secara administratif Timor Timur berada dalam Pemerintahan Transisi dibawah kendali PBB. Selama masa transisi jalannya pemerintahan di wilayah tersebut dilakukan oleh *United Nation Transition Administration of East Timor* (UNTAET) yang ditunjuk oleh PBB sampai pemerintahan definitif Timor Timur terbentuk<sup>79</sup>.

UNTAET didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. Badan ini bertugas untuk memelihara keamanan dan menjaga hukum serta ketertiban di seluruh wilayah Timor Timur. Selain itu

---

<sup>78</sup> Lela E.Madjiah, *Op.cit.*, hal.144; PBB, *Op.cit.*, hal.58-59.

**juga bertanggung jawab secara menyeluruh atas penataan Timor Timur dan mempunyai wewenang untuk menjalankan semua kekuasaan legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi pengadilan<sup>80</sup>. Keberadaan UNTAET disahkan dengan Resolusi No.1272. Sekjen PBB kemudian mengangkat Sergio Vieira de Mello sebagai wakil khususnya dan menjadi administrator transisi untuk Timor Timur pada tanggal 16 November 1999.**

Selama masa kerjanya, UNTAET telah melakukan banyak usaha untuk memperbaiki keadaan Timor Timur dalam berbagai bidang. Sebagai suatu Pemerintahan Transisi yang ditunjuk oleh PBB, UNTAET memiliki hak dan wewenang untuk membuat perjanjian kerjasama dan hubungan baik dengan negara manapun di dunia, serta mengambil tindakan atau kebijakan yang berhubungan dengan kelangsungan dan masa depan Timor Timur. Usaha yang dilakukan UNTAET antara lain, pada tanggal 2 Desember 1999 menandatangani peraturan mengenai pembentukan Komisi Permusyawaratan Nasional (*NCC/National Consultative Council*); tanggal 3 Januari 2000 meresmikan pengendalian pelabuhan udara di Dili; tanggal 19 Januari 2000 UNTAET bertindak atas nama teritorial menandatangani sebuah Nota Kesepakatan memperpanjang masa berlaku perjanjian Selat Timor (*Timor Gab*) dengan Pemerintah Australia; tanggal 21 Januari 2000 membentuk Dinas Pabean Timor Lorosae (Timor Timur). UNTAET pada tanggal 21 Februari bersama-sama dengan Presiden Bank Dunia dan Xanana Gusmao menandatangani suatu perjanjian pengiriman dana sebesar US\$21,5 juta dalam jangka waktu dua setengah tahun untuk pendayagunaan komunitas dan proyek-proyek Pemerintah Daerah; tanggal 27 Maret 2000 membuka sekolah latihan Polisi di Dili; tanggal 3 April 2000 UNTAET bersama-sama dengan Bank Dunia (*World Bank*) dan UNDP menandatangani perjanjian hibah sebesar US\$ 499.000 untuk proyek menciptakan lapangan kerja bagi komunitas miskin di Dili. Pada tanggal 5 April

---

<sup>79</sup> *KOMPAS*, tanggal 15 Agustus 2001.

<sup>80</sup> PBB, *Op.cit.*, hal.63.

2000 UNTAET mengumumkan keputusan mengangkat warga Timor Timur untuk menduduki jabatan administrasi tertinggi dalam tatapraja baru di Dili; tanggal 28 April 2000 meresmikan Dinas Pos Timor Lorosae di Dili; tanggal 7 Juni 2000 UNTAET dan Bank Dunia menandatangani hibah senilai US\$ 12,7 juta untuk membantu perbaikan sektor kesehatan di dalam negeri; pada tanggal 21 Juni 2000 UNTAET dan CNRT menyetujui komposisi dan struktur baru Komisi Permusyawaratan Nasional yang beranggota 33 orang warga Timor Timur<sup>81</sup>.

Pemerintah Republik Indonesia menganggap penting untuk membina hubungan bilateral dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur. Akan tetapi karena pemerintahan definitif Timor Timur belum terbentuk, maka Pemerintah Republik Indonesia berusaha membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintahan Transisi Timor Timur (UNTAET). Hubungan tersebut penting dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia karena Timor Timur dan NKRI merupakan negara bertetangga yang berbatasan langsung. Selain itu juga agar Timor Timur tidak berkembang menjadi sumber ancaman bagi keamanan dan stabilitas dalam negeri Indonesia serta untuk memperbaiki posisi Pemerintah Republik Indonesia di forum internasional<sup>82</sup>. Pergantian Presiden dalam Sidang Umum MPR pada bulan Oktober 1999 dari B.J.Habibie kepada Abdurrahman Wahid merupakan suatu langkah awal memperbaiki posisi dan citra buruk Pemerintah Republik Indonesia di forum internasional. Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Dili (Timor Timur) pada tanggal 29 Januari 2000 menunjukkan niat baik Pemerintah Republik Indonesia untuk membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid mengucapkan permintaan maaf atas semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu kepada keluarga korban insiden Santa Cruz dan keluarga para prajurit yang gugur dan dimakamkan di Taman Makam

---

<sup>81</sup> PBB, *Ibid.*, hal.79-85.

<sup>82</sup> Tim Peneliti Balitbang Deplu RI. *Op.cit.*, hal.61.

pahlawan Seroja di Dili. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga menekankan perlunya kerjasama bagi kedua negara<sup>83</sup>.

Usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk membina hubungan yang baik dengan Timor Timur selama Pemerintahan Transisi (UNTAET) secara resmi ditandai dengan pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI) oleh Presiden Republik Indonesia yang pada waktu itu sedang berkunjung ke Timor Timur pada tanggal 29 Februari 2000. KUKRI berfungsi sebagai penghubung (*liasion*) antara UNTAET dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu juga dilakukan penandatanganan *Joint Communigue* antara Menteri luar negeri RI dan kepala UNTAET. Sebagai tindak lanjut dari isi komunike bersama Pemerintah Republik Indonesia-UNTAET, Presiden Republik Indonesia kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan perundingan RI-UNTAET dengan Keppres No. 47 tahun 2000 untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan *residual matter* sebagai akibat dari peralihan kekuasaan<sup>84</sup>.

Semua sisa masalah (*residual matter*) harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta hubungan yang baik dimasa depan dengan Timor Timur. Oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia dan UNTAET sebagai Pemerintahan Transisi di Timor Timur yang mempunyai hak untuk mewakili rakyat Timor Timur dalam membuat beberapa kesepakatan berhasil membuat kesepakatan dan kerjasama yang mengawali terbinanya

---

<sup>83</sup> Sabam Siagian, “ Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Timor Timur Pasca pemisahan dan Integritas Bangsa”, makalah yang disampaikan dalam *Forum Dialog VII* (Bandung: Balitbang Deplu RI, tanggal 6-8 Juli 2000), hal., 10.

<sup>84</sup> Tim Peneliti Balitbang Deplu RI, *Op.cit.*, hal.62.

hubungan diantara dua negara yang bertetangga. Mengawali hubungan antara kedua pihak, Pemerintah Republik Indonesia dan UNTAET pada tanggal 11 April 2000 berhasil menandatangani Nota Kesepahaman mengenai batas wilayah<sup>85</sup>. Berdasarkan Nota Kesepahaman itu Pemerintah Republik Indonesia kemudian membentuk satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) NTT-Timor Timur. Pemerintah Republik Indonesia juga memberlakukan adanya surat jalan bagi orang-orang yang bepergian melalui jalan darat dari NTT ke Timor Timur. Pemberlakuan surat jalan tidak berlangsung lama dan pada tanggal 26 Oktober hal itu dicabut karena dianggap menyulitkan masyarakat yang bepergian ke Timor Timur. Kebijakan tersebut diganti dengan mencatat identitas orang-orang yang akan bepergian ke Timor Timur<sup>86</sup>. Persoalan batas wilayah sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal ini berhubungan dengan aktivitas dan lalu lintas orang dan barang dalam bidang perdagangan dan perekonomian yang dilakukan oleh orang-orang dari kedua wilayah secara terbuka (legal). Persoalan ini juga dibahas dan diatur dalam lembaga *Joint Border Commission* (JBC) yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Transisi Timor Timur (UNTAET). Melalui lembaga *Joint Border Commission*, kedua pihak sepakat untuk sementara sebelum Timor Timur merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri maka batas wilayah antara Indonesia-Timor Timur tetap mengacu kepada peta kolonial Portugis dan Belanda<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> PBB, *Op.cit.*, hal.83.

<sup>86</sup> *KOMPAS*, tanggal 26 Oktober 2001.

<sup>87</sup> *Bali Post*, tanggal 26 April 2002.

Pemerintah Republik Indonesia dan UNTAET juga melakukan kerjasama dalam usaha penyelesaian persoalan pengungsi yang berada di perbatasan antara Timor Timur dan Timor Barat (NTT). Kedua pihak dengan bantuan dari badan utusan PBB yang menangani masalah pengungsi (UNHCR) telah melakukan usaha registrasi dan repatriasi bagi para pengungsi. Hal ini mulai dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001. Langkah ini dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui orang-orang yang menginginkan kembali ke Timor Timur dan orang-orang yang ingin tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena UNTAET tidak lama berada di Timor Timur, maka penanganan persoalan ini kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Timor Timur yang telah terbentuk. Keadaan para pengungsi yang jumlahnya sangat banyak juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Banyak bantuan yang diterima oleh para pengungsi berupa bahan makanan, pakaian, obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan buku-buku pendidikan dari berbagai pihak yang bersimpati atas nasib mereka. Bantuan dan perhatian dari berbagai pihak sangat diperlukan oleh para pengungsi dan Pemerintah Daerah setempat karena dapat meringankan beban mereka.

Keberadaan UNTAET di Timor Timur berakhir tidak lama setelah Timor Timur merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri yang dibentuk melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Konstitusional yang berhak menentukan Undang Undang Dasar (UUD) dan membuat Konstitusi untuk menentukan pemilihan Presiden secara langsung serta mewujudkan

kemerdekaan penuh bagi Timor Timur<sup>88</sup>. Dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Independen dan UNTAET pada tanggal 30 Agustus 2001 terpilih Kay Rala Xanana Gusmao sebagai presiden pertama Timor Timur untuk periode 2002-2007. Kepastian terpilihnya Xanana Gusmao sebagai presiden diperoleh setelah Komisi Pemilihan Independen (KPI) mengumumkan hasil pemilu yang telah dilakukan oleh sekitar 422.000 rakyat Timor Timur<sup>89</sup>. Xanana memperoleh dukungan suara sebanyak 82,7% mengalahkan Fransisco Xavier de Amaral yang memperoleh 17,3% suara.

---

<sup>88</sup> *KOMPAS*, tanggal 15 Agustus 2001; *TEMPO*, Edisi 29 April 2001.

<sup>89</sup> *Ibid.*, tanggal 3 September 2001.



## BAB IV

### HUBUNGAN BILATERAL RI-TIMOR TIMUR DALAM PENYELESAIAN *RESIDUAL MATTER*

Tepat pukul 00.00 waktu Timor Timur atau pukul 22.00 WIB pada tanggal 20 Mei 2002 Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Timur resmi berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini berarti bahwa Timor Timur secara resmi telah berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah selama sekitar 23 tahun berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi propinsi ke-27<sup>90</sup>. Pemisahan diri rakyat Timor Timur dari NKRI secara konstitusional diperkuat dengan Ketetapan MPR No.V/MPR/1999. Dengan kemerdekaan yang telah dicapai maka rakyat Timor Timur mempunyai hak untuk menentukan masa depan dan mengatur urusan dalam negeri sendiri atau *internal self government* tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak lain. Disamping itu, Pemerintah Timor Timur juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membina hubungan dan kerjasama dengan negara manapun.

Kemerdekaan Timor Timur merupakan suatu kenyataan sejarah yang harus diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, terutama jika mengacu pada Mukadimah UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Berdirinya negara Timor Timur ditandai dengan pelantikan Ray Kala

---

<sup>90</sup> Arsip DPR.RI No:AA.5/KD/1864/DPR-RI/1976 Perihal: Persetujuan DPR-RI mengenai RUU Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dalam NKRI dan pembentukan Propinsi Dati I Timor Timur.

Xanana Gusmao sebagai presiden pertama<sup>91</sup>. Pemerintahan baru tersebut berhak mengatur jalannya pemerintahan dalam negeri menggantikan UNTAET (*United Nation Transitional Administration of East Timor*)

Sejak Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Timur merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berkepentingan untuk membina hubungan bilateral antara kedua negara yang baik dan berorientasi kedepan. Hal ini perlu dilakukan supaya Timor Timur tidak berkembang menjadi suatu ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional. Disamping itu terciptanya hubungan bilateral yang baik antara kedua negara dapat membantu usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki citra buruk dan posisinya di forum internasional. Hubungan bilateral yang harmonis dan menguntungkan bagi kedua negara sangat penting untuk dilakukan dan diusahakan sebagai negara bertetangga dan bagian dari pergaulan masyarakat internasional. Menteri Luar Negeri Timor Timur, Jose Ramos Horta menegaskan bahwa hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Timur (RDTL) sangat penting dan jauh lebih penting dibandingkan dengan persoalan lain yang muncul seperti dakwaan keterlibatan beberapa perwira TNI/POLRI dalam kerusuhan di Timor Timur pasca Jajak Pendapat tanggal 30 Agustus 1999<sup>92</sup>. Meskipun demikian, untuk membina dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara kedua negara adalah tidak mudah dan memiliki banyak hambatan. Hal ini antara lain karena masih ada rasa kecewa dan beban psikologis yang dirasakan oleh beberapa kelompok masyarakat, baik di Indonesia ataupun Timor Timur sehingga tidak

---

<sup>91</sup> [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG).

mudah untuk dapat menerima kebijakan politik yang dibuat oleh kedua negara. Untuk itu rekonsiliasi dan sikap *forget and forgive* (melupakan dan memaafkan) yang tulus dari mereka atas semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur, yaitu Politik Luar Negeri Republik Indonesia dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur dan masalah-masalah dalam membina hubungan bilateral dengan Timor Timur.

#### A. Kebijakan Politik Luar Negeri RI Dalam Membina Hubungan Bilateral Dengan Timor Timur

Tidak ada suatu negara yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan dari negara lain bagaimanapun kuatnya negara itu, begitu juga dengan Indonesia. Dukungan dan bantuan dari negara lain sangat diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan Stabilitas Nasional, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Politik Luar Negeri, salah satu kebijakan yang paling penting adalah mengenai usaha untuk ikut memelihara hubungan bertetangga yang baik. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membina suatu hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan negara lain dalam bentuk hubungan bilateral, regional, maupun multilateral/internasional termasuk dengan Timor Timur yang pernah menjadi bagian dari NKRI selama sekitar 23 tahun. Timor Timur bergabung dengan NKRI

---

<sup>92</sup> KOMPAS, tanggal 4 Maret 2000.

sebagai Propinsi ke-27 dengan sebuah proses integrasi. Hal itu diperkuat dengan UU No.7 Tahun 1976<sup>93</sup>. Usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk membina hubungan yang baik dengan negara lain adalah sesuai dengan Politik Luar Negeri bebas aktif yang dijalankan.

Politik Luar Negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil dari perpaduan antara politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Pada lingkup internasional, perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika internasional dan globalisasi saat ini ditandai oleh terjadinya perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar; menguatnya *interlinkages* antara forum global, interregional, regional, sub regional, dan bilateral; meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara (individu) dalam hubungan internasional; dan munculnya isu-isu baru didalam agenda internasional seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang berdampak pada semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antar bangsa<sup>94</sup>.

Politik Luar Negeri oleh para ahli hubungan internasional diartikan sebagai konsekuensi upaya negara dalam menjalankan fungsi utamanya melindungi dan menyejahterakan rakyat<sup>95</sup>. Sedangkan menurut Holsti, Politik Luar Negeri merupakan rumusan konkret yang berasal dari gabungan antara kepentingan nasional, situasi internasional yang berlaku, serta kekuatan negara.

---

<sup>93</sup> Arsip Lembaran Negara Republik Indonesia No.35,1976.

<sup>94</sup> Alwi Shihab." Garis Besar Kebijaksanaan Luar Negeri dan Diplomasi Republik Indonesia Memasuki Abad Ke-21", makalah yang disampaikan dalam *Acara Curah Pendapat Tentang Perkembangan Dunia dan Kebijakan Luar Negeri RI*, ( Jakarta: Balitbang Deplu RI, tanggal 22 November 2000), hal.1.

Rumusan-rumusan tersebut merupakan hasil konkret dari suatu kebijaksanaan yang diambil oleh negara. Lebih lanjut Holsti menunjukkan bahwa kebijakan Politik Luar Negeri adalah tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungan, baik berupa sikap, kebijakan, atau tindakan<sup>96</sup>. Dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri, Pemerintah Republik Indonesia lebih berfokus kepada kebijakan-kebijakan yang berorientasi kedepan dan menguntungkan bagi semua pihak. Bagi Pemerintah Republik Indonesia prinsip Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif bukan merupakan politik yang bersifat tertutup atau kaku. Pada dasarnya politik Luar Negeri bebas dan aktif bersifat fleksibel dan tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penafsiran atau interpretasi kembali atas politik tersebut. Politik Luar Negeri bebas aktif dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberi kesempatan bagi negara untuk membina kerjasama dan hubungan dengan negara manapun tanpa ada tekanan atau intervensi serta ikut menjaga dan menciptakan perdamaian dunia selama hubungan yang dibina saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia mengutamakan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan nasional tanpa ada tekanan (*non-interference*).

---

<sup>95</sup> Andi Purwono, "Pro-Kontra Kehadiran Mega di Timor Timur", dalam *Suara Merdeka*, Mei 2002.

Berdasar Politik Luar Negeri bebas aktif penting maka Pemerintah Republik Indonesia dapat membina hubungan bilateral dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur serta menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut. Banyak faktor yang mendukung dan mempengaruhi kedua negara untuk membina kerjasama yang baik, terutama faktor geografis dan Bahasa Indonesia. Secara geografis letak kedua negara berdekatan dan berbatasan secara langsung, selain itu Bahasa Indonesia juga telah dikenal dan digunakan oleh rakyat Timor Timur. Akan tetapi faktor tersebut tidak menjamin bagi terciptanya hubungan dan kerjasama bilateral yang baik Oleh sebab itu kedua negara harus dapat menyelesaikan masalah internal yang ada dengan cara melakukan suatu rekonsiliasi dan saling memaafkan atas semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu.

Persoalan Timor Timur selalu menjadi sorotan masyarakat internasional, khususnya PBB. Hal itu karena PBB sejak awal tidak mengakui pernyataan integrasi rakyat Timor Timur ke NKRI. Timor Timur merupakan koloni Portugal yang menyatakan berintegrasi dengan NKRI karena kegagalan konsep dekolonosasi yang dilakukan Pemerintah Portugal<sup>96</sup>. Penyelesaian persoalan Timor Timur juga tidak terlepas dari tekanan atau intervensi negara lain sehingga mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini tampak dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie yang memberikan Opsi II sebagai tanggapan

---

<sup>96</sup> K.J.Holsti, *Politik Internasional Kerangka Analisa*, ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal.135.

<sup>97</sup> Arsip Lembaran Negara Republik Indonesia No.B-025/Assus/9/1975.

atas surat yang dikirim oleh PM Australia-John Howard kepada Presiden Republik Indonesia. Tekanan dari PBB dan negara lain (AS dan Australia) juga terlihat dalam kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima pengiriman UNAMET (*United Nation Mission in East Timor*) sebagai penyelenggara Jajak Pendapat yang berperan besar dalam proses kemerdekaan Timor Timur. Pemerintah Republik Indonesia juga tidak dapat menolak pengiriman pasukan multinasional INTERFET (*International Force East Timor*) yang dipimpin oleh Australia ke Indonesia untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di Timor Timur.

Pasca Jajak Pendapat tanggal 30 Agustus 1999 Pemerintah Republik Indonesia mendapat kritik dari masyarakat internasional atas kekerasan dan kekacauan yang terjadi di Timor Timur. Kritik keras disampaikan antara lain oleh Presiden AS-Bill Clinton yang menganggap bahwa telah terjadi tindakan anarkhi di Timor Timur yang tidak dapat ditolerir oleh masyarakat internasional. Dewan Perwakilan Rakyat AS juga mengeluarkan keputusan yang mendesak Pemerintah AS mempertimbangkan sanksi tambahan untuk mengakhiri pemberontakan sipil dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur<sup>98</sup>. Posisi Pemerintah Republik Indonesia semakin lemah dan terpuruk pada waktu Sekjen PBB-Kofi Annan dalam suatu konferensi pers di Markas Besar PBB mengatakan bahwa ada kemungkinan para pemimpin di Jakarta melakukan tindakan kriminal terhadap peri kemanusiaan dan melanggar HAM sehingga dapat diajukan ke pengadilan

---

<sup>98</sup> Keputusan Majelis No.292 mengenai Timor Timur, butir ke-12 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta.

internasional untuk kejahatan perang<sup>99</sup>. Untuk menyelidiki tuduhan itu maka komisi tinggi PBB urusan HAM menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Internasional<sup>100</sup>, akan tetapi hal itu ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Banyaknya intervensi atau tekanan dan campur tangan dari pihak luar dalam persoalan Timor Timur sangat merugikan karena hal tersebut memperlumah kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia perlu membina hubungan bilateral dan kerjasama dengan Pemerintah Timor Timur sebagai usaha untuk memperbaiki posisi Indonesia di forum internasional.

Usaha serius yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan dan membina hubungan diplomatik antara dua negara yang baik dengan Pemerintah Timor Timur terlihat dari kunjungan Presiden Megawati ke negara baru tersebut pada saat upacara kemerdekaan dan pelantikan Xanana Gusmao sebagai Presiden pertama pada tanggal 20 Mei 2002. Kunjungan tersebut mengawali terbinanya hubungan dan kerjasama diplomatik antara kedua negara karena hal ini merupakan suatu kunjungan diplomatik tingkat tinggi seorang Kepala Negara yang dapat dijadikan sebagai “pembuka jalan” bagi terciptanya hubungan bilateral yang harmonis dan kerjasama yang baik antara kedua negara. Hubungan diplomatik ini kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan pejabat-pejabat dibawahnya.

Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Timor Timur tersebut mendapat protes dan penolakan serta menjadi perdebatan banyak pihak sehingga

---

<sup>99</sup> [WWW.ETAN.ORG](http://WWW.ETAN.ORG).



menimbulkan pro-kontra. Ada pihak-pihak yang setuju dan mendukung keputusan Presiden Megawati untuk memenuhi undangan Presiden Timor Timur, ada juga yang menolak keputusan tersebut. Dukungan antara lain diberikan oleh Direktorat Jendral Asia-Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri –Makarim Wibisono. Ia berpendapat bahwa kunjungan tersebut menunjukkan adanya elemen kontinuitas dari konsistensi sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap permasalahan Timor Timur. Hal itu menurut Makarim juga sesuai dengan kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang berorientasi kedepan dalam usaha memelihara hubungan yang baik dalam kehidupan bertetangga<sup>101</sup>. Dukungan juga diberikan oleh pengamat politik-Indria Samego. Ia menganggap bahwa kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Timor Timur dapat berdampak positif bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di forum internasional. Bahkan Indria Samego menganggap pihak-pihak yang tidak dapat menerima keputusan presiden tersebut masih bersifat kekanak-kanakan karena cepat atau lambat Pemerintah Republik Indonesia harus membina hubungan dengan Pemerintah Timor Timur sebagai negara yang hidup bertetangga<sup>102</sup>.

Sikap penolakan dan keberatan atas kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Timor Timur diungkapkan oleh beberapa anggota DPR RI, seperti Akbar Tandjung. Ia beralasan bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden Megawati akan menyakiti perasaan rakyat Indonesia<sup>103</sup>. Penolakan dan kekecewaan atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia

---

<sup>100</sup> *KOMPAS*, tanggal 29 September 1999.

<sup>101</sup> *Ibid.*, tanggal 25 April 2002.

<sup>102</sup> *Ibid.*

tersebut terutama dilakukan oleh para mantan tentara yang sekarang menderita cacat fisik sebagai korban dalam integrasi Timor Timur<sup>104</sup>. Mereka membakar piagam penghargaan Satya Lencana Seroja yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Piagam tersebut diberikan sebagai suatu tanda penghargaan yang diberikan atas jasa para pahlawan dan veteran Operasi Seroja 1975-1978 pada saat Timor Timur berintegrasi dengan NKRI<sup>105</sup>. Operasi Seroja mengakibatkan banyak tentara yang meninggal dan cacat fisik serta mental. Mereka yang mengalami cacat fisik banyak yang bertempat tinggal di kompleks wisma Seroja, Bekasi<sup>106</sup> dan menjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Politik Luar Negeri untuk membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Timor Timur. Hal tersebut tampak dari sikap pro aktif yang diberikan oleh Xanana Gusmao sebagai Presiden Timor Timur dengan memberi prioritas untuk membuka Kedutaan Besar di Indonesia<sup>107</sup>. Xanana berpendapat bahwa kehidupan yang lebih baik akan tercipta di Timor Timur dengan perdamaian yang diwujudkan dengan rekonsiliasi dan kerjasama<sup>108</sup>. Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Timur sepakat untuk membina hubungan bilateral dan kerjasama diplomatik

---

<sup>103</sup> Lela E.Madjiah, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, ( Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2002), hal.92.

<sup>104</sup> *Suara Merdeka*, tanggal 26 April 2002.

<sup>105</sup> Arsip Lembaran Negara Republik Indonesia No.3,1978.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Kol.(Purn) Ronny Muaya,SH mantan prajurit Lintas Udara (Linud) Kostrad dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang dan Warakawuri Operasi Seroja Timor Timur, tanggal 12 Januari 2004.

<sup>107</sup> Lela E.Madjiah, *Op.cit.*, hal.186.

dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dan membentuk *Joint Commission* (JC) yang bertugas membahas persoalan kedua negara, termasuk pengembalian aset Pemerintah Republik Indonesia di Timor Timur. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri RI) dan Jose Ramos Horta (Menteri Luar Negeri Timor Timur) serta disaksikan oleh Presiden Megawati, Xanana Gusmao, dan beberapa menteri dari kedua negara. Kedua negara sepakat untuk membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan Dili. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, pembukaan Kedutaan Besar telah dilakukan di Dili (Timor Timur) pada masa Pemerintahan UNTAET, yang pada waktu itu bernama Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI). Dalam acara penandatanganan MoU itu Pemerintah Republik Indonesia menawarkan kerjasama ekonomi dengan Timor Timur di bidang energi, perhubungan, dan perdagangan.

Kerjasama dalam bidang perekonomian bagi kedua negara sangat diperlukan, terutama bagi Pemerintah Timor Timur. Hal ini menurut Presiden Timor Timur-Xanana Gusmao dilakukan sebagai suatu usaha untuk memperbaiki kehidupan di Timor Timur dan mensejahterakan rakyat mengingat kondisi perekonomian negara itu yang sangat kacau dimana tingkat pengangguran 90%, 70% infrastruktur umum di wilayah itu hancur<sup>109</sup>. Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh wakil kedua negara maka banyak usaha yang dilakukan oleh kedua pihak untuk mensukseskan kesepakatan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia antara lain telah berusaha membuka jalur transportasi darat yang

---

<sup>108</sup>TEMPO, Edisi 2 Juni 2001.

menghubungkan kedua negara sebagai usaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan perekonomian sehingga Timor Timur bisa mendatangkan produk-produk yang berasal dari beberapa wilayah Republik Indonesia, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sementara itu Pemerintah Timor Timur sepakat mencari cara terbaik bagi kedua negara untuk menyelesaikan masalah aset Pemerintah Republik Indonesia di Timor Timur<sup>110</sup>.

## B. Masalah-Masalah Dalam Membina Hubungan Bilateral RI-Timor Timur

Hubungan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan negara lain sangat berpengaruh bagi stabilitas nasional Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia menganggap penting untuk membina hubungan bilateral dan kerjasama yang baik dengan negara tetangga, termasuk Timor Timur yang telah merdeka dan berdaulat. Akan tetapi untuk membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur tidak mudah karena masih terdapat banyak masalah yang tersisa (*residual matter*) yang dapat menghambat terbinanya hubungan baik antara kedua negara. Ada kendala berupa masalah emosional dan beban psikologis yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang kecewa atas keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Opsi II sebagai cara penyelesaian akhir terhadap persoalan Timor Timur.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Media Indonesia*, tanggal 6 Juli 2002..

Permasalahan lain yang dapat menghambat hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Timur adalah masalah Aset Pemerintah Republik Indonesia yang masih berada di Timor Timur, perbatasan wilayah antara kedua negara, dan pengungsi.

#### 1. Aset Pemerintah RI

Selama sekitar 23 tahun berintegrasi dengan NKRI, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan usaha pembangunan dan perbaikan di wilayah Timor Timur. Pembangunan dilakukan dengan tujuan agar wilayah tersebut tidak tertinggal jauh dengan wilayah lain di Indonesia . Dalam proses pembangunan banyak aset milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, ataupun perorangan yang diinvestasikan di Timor Timur. Aset-aset tersebut antara lain PLN, Telkom, Pertamina, Perhutani, dan Pos. Selain bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di Timor Timur, investasi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.

Penyelesaian aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang telah di investasikan di Timor Timur sejak tahun 1976 melalui pembangunan tidak mudah dilakukan karena semua pihak masih mementingkan penyelesaian masalah politik. Disamping itu perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut selalu tidak mendapat titik temu. Pihak Indonesia menghendaki aset-aset milik Pemerintah Republik Indonesia ditarik dari Timor Timur dan sebagian tetap berada di negara itu sebagai bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan seperti disampaikan oleh Ramos

Horta pihak Timor Timur menghendaki aset-aset tersebut tetap berada di negara itu dan menjadi milik Pemerintah Timor Timur sebagai ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Timor Timur selama berintegrasi dengan NKRI<sup>111</sup>. Kesulitan lain adalah proses pemulihan atau bentuk transfer dari seluruh aset milik Pemerintah Republik Indonesia, BUMN, swasta, dan perorangan tersebut<sup>112</sup> karena tidak mungkin aset-aset yang masih berada di Timor Timur seperti Telkom, Pos, dan Pertamina, dapat diminta kembali secara fisik. Berkaitan dengan persoalan ini, pengamat ekonomi-Faisal Basri berpendapat bahwa pemanfaatan aset Pemerintah Republik Indonesia adalah menjadi hak Pemerintah Timor Timur tetapi pengusaha Indonesia dapat terlibat seandainya ada kesempatan bisnis yang bagus. Hal yang lebih penting menurutnya adalah membina hubungan baik dengan rakyat dan Pemerintah Timor Timur dengan menghilangkan luka lama<sup>113</sup>.

Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat meminta pengembalian aset-aset tersebut secara langsung. Penarikan aset-aset milik Pemerintah Republik Indonesia harus dilakukan melalui prosedur internasional dengan kesepakatan kedua negara. Persoalan penarikan aset milik Pemerintah Republik Indonesia telah dibahas oleh kedua negara dalam acara penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Joint Commission* (JC). Segala aset Pemerintah Republik Indonesia di Timor Timur dihitung jumlah dan besarnya kemudian diajukan ke PBB. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu hubungan diantara kedua negara.

---

<sup>111</sup> TEMPO, Edisi 2 Juni 2001; [WWW.Sekitar Kita.Com](http://WWW.Sekitar Kita.Com).

<sup>112</sup> *Suara Merdeka*, tanggal 6 September 1999.

<sup>113</sup> TEMPO, Edisi 2 Juni 2001.

Sedangkan untuk aset perseorangan yang umumnya milik masyarakat pendatang dilakukan pendataan terlebih dahulu. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan tentang status mereka apakah ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau menjadi warga negara Timor Timur<sup>114</sup>. Sampai saat ini beberapa pengusaha dan investor dari Indonesia telah berusaha menanamkan modal di Timor Timur untuk membantu pembangunan negara tersebut.

## 2. Batas Wilayah

Masyarakat yang bertempat tinggal di perbatasan antara Timor Barat (Indonesia) dan Timor Timur memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang hampir sama. Hal ini karena ada persamaan geografis di dua wilayah tersebut sehingga memudahkan mereka untuk saling berinteraksi. Akan tetapi keadaan itu berubah setelah Timor Timur berpisah dari NKRI sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tidak bebas dan mudah untuk berinteraksi. Mereka tidak dapat dengan mudah keluar masuk daerah perbatasan karena aktivitas mereka dibatasi dan diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh masing-masing negara. Apabila dulu mereka dapat bebas keluar masuk daerah perbatasan, saat ini mereka harus membawa paspor jika ingin masuk ke wilayah perbatasan kedua negara. Oleh sebab itu batas wilayah merupakan suatu hal yang sangat “sensitif” dalam pergaulan hidup bertetangga karena tidak jarang hal itu menyebabkan timbulnya konflik dan permusuhan antar bangsa. Agar tercipta hubungan yang baik dimasa depan maka perlu bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Timur untuk menentukan batas wilayah, baik darat maupun laut secara tegas.

---

<sup>114</sup> *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 21 Agustus 2003.

Usaha untuk menentukan batas wilayah Republik Indonesia dan Timor Timur telah dilakukan sebelum Timor Timur merdeka oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Transisi di Timor Timur (UNTAET) melalui lembaga *Joint Border Commission* (JBC). Referensi yang dipakai oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan batas wilayah kedua negara adalah peta produk konferensi Belanda dan Portugis yang telah diperbaiki oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal)<sup>115</sup>.

Persoalan batas wilayah antara negara Indonesia dan Timor Timur penting untuk segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan baru yang mempengaruhi hubungan kedua negara. Usaha penyelesaian batas wilayah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Timur melalui suatu perundingan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan pemangku adat yang tinggal disekitar perbatasan kedua negara<sup>116</sup>. Mereka diperlukan sebagai penengah untuk memberi masukan dan jalan keluar antara pemerintah kedua negara dan masyarakat setempat agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Selain itu mereka juga lebih tahu batas-batas wilayah yang telah dibuat oleh para leluhur mereka sejak zaman dulu. Untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan, Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Timur sepakat untuk menempatkan petugas penjaga keamanan untuk mencatat semua orang yang keluar masuk wilayah tersebut. Pada saat ini telah disepakati bahwa batas wilayah darat antara kedua negara adalah daerah Atambua

---

<sup>115</sup> *Bali Post*, tanggal 26 April 2002.

<sup>116</sup> *Suara Karya*, tanggal 10 Desember 2003.



(Kabupaten Belu), Distrik Bobonaro, Covalima, dan Oecusse sementara untuk batas wilayah laut berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku (ZEE).

### 3. Pengungsi

Pengungsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah Timor Timur sejak awal integrasi sampai pasca Jajak Pendapat yang menghantarkan kepada kemerdekaan Timor Timur. Pengungsian masyarakat Timor Timur, khususnya masyarakat pendatang terjadi sejak pengumuman Opsi I dikeluarkan oleh Presiden B.J.Habibie pada tanggal 9 Juni 1998. Setelah Opsi II dikeluarkan oleh Pemerintah tanggal 27 Januari 1999 jumlah pengungsi yang meninggalkan wilayah itu semakin bertambah. Mereka tidak hanya para pendatang, tetapi juga orang Timor Timur asli dari pihak pro-integrasi maupun anti-integrasi. Selain ada rasa khawatir atas masa depan dan keselamatan mereka, tindakan ini mereka lakukan karena alasan keamanan. Mereka tidak tahan menghadapi aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang bertikai terhadap mereka<sup>117</sup>. Para pengungsi meninggalkan Timor Timur untuk mencari perlindungan dan keamanan di daerah lain dengan meninggalkan semua yang mereka miliki. Puncak dari arus pengungsian terjadi setelah Jajak Pendapat tanggal 30 Agustus 1999 dimana sekitar 250.000 sampai 300.000 orang Timor Timur pergi meninggalkan tempat tinggalnya menuju daerah perbatasan dengan Timor Barat<sup>118</sup>.

Masyarakat pendatang yang tinggal di Timor Timur umumnya memilih untuk kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Mereka tidak mau kembali

---

<sup>117</sup> Zacky A.Makarim,dkk, *Hari Hari Terakhir Timor Timur.Sebuah Kesaksian*, ( Jakarta: Sportif Media Informasindo), hal.83.

ke Timor Timur meskipun harta benda mereka masih banyak yang tertinggal di wilayah itu. Akan tetapi sebagian besar pengungsi yang merupakan penduduk asli Timor Timur berharap dapat kembali ke kampung halaman mereka di Timor Timur apabila keadaan keamanan di wilayah itu telah pulih kembali. Para pengungsi itu tersebar di beberapa daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Timur, seperti di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Kotamadya Kupang. Mereka tinggal di barak-barak yang telah dibangun dan disediakan oleh pemerintah, tetapi ada juga yang tinggal di rumah penduduk<sup>119</sup>.

Masalah pengungsi menambah persoalan politik yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia karena di tempat pengungsian sering terjadi konflik antara sesama pengungsi maupun antara para pengungsi dengan penduduk setempat karena emosi mereka yang sangat labil. Selain itu para pengungsi yang membutuhkan bantuan makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan menimbulkan persoalan baru bagi Pemerintah Daerah Propinsi NTT karena beradannya mereka menjadi beban bagi Pemerintah setempat.

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani masalah pengungsi karena hal ini berpengaruh terhadap citra dan posisi Pemerintah Republik Indonesia di forum internasional. Untuk keperluan kesehatan para pengungsi, selama enam bulan pertama Departemen Kesehatan RI telah mengalokasikan dana sekitar delapan milyar rupiah yang

---

<sup>118</sup> Sindunata, *Jembatan Air Mata. Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hal.xxiii.

<sup>119</sup> *KOMPAS*, tanggal 10 September 1999.

didapatkan dari konversi anggaran pembangunan kesehatan Timor Timur. Departemen Kesehatan RI juga telah mengirim beberapa dokter dan tenaga medis serta obat-obatan ke kamp-kamp pengungsian<sup>120</sup>. Usaha lain yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah mengadakan registrasi bagi para pengungsi Timor Timur pada tanggal 6 Juni 1999. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNTAET sebelum Pemerintahan Timor Timur terbentuk agar para pengungsi dapat menentukan pilihannya untuk tetap berada di Indonesia atau kembali ke Timor Timur. Menurut Kepala Pusat Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk (BAKMP) yang juga anggota tim sosialisasi registrasi-Mirwanto Manuwijoyo, registrasi dilakukan untuk memperoleh data yang baru dan rinci mengenai jumlah pengungsi, latar belakang, dan keinginan para pengungsi sebagai langkah awal pemerintah untuk melakukan repatriasi<sup>121</sup>.

Repatriasi atau pengembalian para pengungsi ke Timor Timur dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia karena banyak dari pengungsi yang menginginkan kembali ke Timor Timur. Setelah Timor Timur merdeka, usaha repatriasi terhadap para pengungsi yang berada di perbatasan Timor Timur dan Timor Barat (Indonesia) tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dibantu badan komisi khusus PBB yang bertugas untuk mengurus para pengungsi (*UNHCR/United Nation High Commission of Refugees*). Para pengungsi yang memilih untuk kembali ke Timor Timur di data dan setelah itu

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, tanggal 9 September 1999.

dikembalikan ke Timor Timur, sedangkan para pengungsi yang memilih untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ada yang pulang ke daerah asalnya dan ada yang dikirim ke daerah transmigrasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mereka diperlakukan sama dengan WNI lainnya dan mendapat lahan pertanian dan bimbingan serta pelayanan usaha ekonomi produktif.

Banyak dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan repatriasi para pengungsi Timor Timur. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indonesia-Jussuf Kalla mengatakan bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2002 Pemerintah Pusat telah menyediakan dana sebesar 38 milyar rupiah untuk repatriasi terhadap 80.000 pengungsi yang masih tersisa<sup>122</sup>. Oleh karena itu setelah lebih dari sebagian pengungsi kembali ke daerahnya masing-masing, sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia menghentikan paket bantuan pangan dan uang lauk<sup>123</sup> bagi para pengungsi.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, tanggal 15 Mei 2001.

<sup>122</sup> Sindhunata, *Op.cit.*, hal.xxviii.

<sup>123</sup> *KOMPAS*, tanggal 4 Januari 2001.

## BAB V

### KESIMPULAN

Persoalan Timor Timur sejak awal berintegrasi ke dalam NKRI tanggal 17 Juli 1976 sampai berpisah dengan NKRI melalui Jajak Pendapat (referendum) yang diselenggarakan oleh UNAMET tanggal 30 Agustus 1999 selalu menjadi fokus perhatian masyarakat internasional dan tidak terlepas dari tekanan atau intervensi serta campur tangan pihak luar. Hal ini tampak dari keputusan tentang tawaran (Opsi) II yang dikeluarkan oleh Presiden B.J.Habibie tentang masa depan Timor Timur sebagai tanggapan atas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia -John Howard kepada dirinya. Tekanan lain juga dirasakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari pengiriman pasukan dan badan-badan internasional (INTERFET, UNAMET, UNTAET) yang bertugas mengatur, menyelenggarakan, mengawasi Jajak Pendapat dan mengamankan wilayah Timor Timur pasca Jajak Pendapat. Banyaknya tekanan atau intervensi dan campur tangan masyarakat internasional dalam persoalan Timor Timur sangat merugikan Pemerintah Republik Indonesia karena memperlemah kebijakan politik Luar Negeri Republik Indonesia dan berpengaruh terhadap Stabilitas Nasional. Oleh karena itu, dengan berdirinya Timor Timur sebagai sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002 penting bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membina hubungan bilateral yang baik dan kerjasama yang harmonis dengan negara itu.

Kemerdekaan Timor Timur telah tampak pada saat hasil Jajak Pendapat diumumkan oleh PBB. Jajak Pendapat diselenggarakan oleh UNAMET pada

tanggal 30 Agustus 1999 dan diikuti oleh sebanyak 600.000 orang Timor Timur yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, Jajak Pendapat juga diikuti oleh 30.000 orang Timor Timur yang tinggal di daerah lain, seperti Denpasar, Jakarta, Makasar, Surabaya, Yogyakarta, dan juga diikuti oleh orang Timor Timur yang tinggal di negara lain, seperti AS, Australia, Macao, Mozambik, dan Portugal<sup>124</sup>. Dari hasil dari Pajak Pendapat yang diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999, sebanyak 78,5% atau sekitar 344.580 orang menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas yang diberikan oleh pemerintah dan 21,5% atau 94.388 orang menerima tawaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur menginginkan berpisah dari NKRI. Dengan kenyataan tersebut maka pemerintah Republik Indonesia bersikap menghormati keinginan dan pilihan rakyat Timor Timur dan melepaskan wilayah itu dengan status seperti sebelum berintegrasi ke dalam NKRI. Keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha melepaskan Timor Timur tampak dengan keluarnya Ketetapan MPR No.V/MPR/1999 yang dibuat oleh MPR hasil Pemilu tanggal 7 Juni 1999 dalam Sidang Pleno.

Keputusan Presiden B.J.Habibie tentang Opsi II sangat mengejutkan, baik bagi masyarakat domestik maupun internasional. Sabam Siagian mengungkapkan bahwa keputusan itu sebagai suatu tindakan yang terburu-buru, emosional, dan menunjukkan karakter Presiden B.J.Habibie yang meletup-letup<sup>125</sup>. Keputusan tersebut diambil ketika Pemerintah Republik Indonesia melalui para diplomatnya

---

<sup>124</sup> *KOMPAS*, tanggal 7 Mei 1999.

sedang berusaha meningkatkan diplomasi di forum internasional untuk mensosialisasikan konsep otonomi luas. Hal ini menimbulkan reaksi beragam, berupa penolakan maupun dukungan. Penolakan atas keputusan tersebut terutama dilakukan oleh para tentara mantan pejuang Operasi Seroja, sedangkan dukungan diberikan oleh PBB yang sejak awal tidak mengakui integrasi Timor Timur ke dalam NKRI, Pemerintah Portugal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Kemerdekaan Timor Timur merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh karena itu penting bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan membina hubungan bilateral yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan Timor Timur. Hal ini penting dilakukan agar Timor Timur tidak berkembang menjadi sumber ancaman bagi keamanan dan Stabilitas Nasional. Selain itu keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk membina hubungan bilateral dan kerjasama yang baik dengan Timor Timur merupakan suatu cara untuk memperbaiki citra dan posisi Indonesia di forum internasional yang terpuruk dan sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri bebas aktif.

Politik Luar Negeri bebas aktif di dasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. GBHN antara lain menegaskan arah Politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan negara, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, serta

---

<sup>125</sup> Sabam Siagian, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Timor Timur pasca Pemisahan dan Menjaga Integritas Bangsa", Makalah disampaikan dalam *Forum Dialog VII*, (Bandung; Balitbang Deplu RI, tanggal 6-8 Juli 2000), hal.3.

meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat<sup>126</sup>. Politik Luar Negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersifat fleksibel dan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk membina kerjasama dan hubungan dengan negara manapun selama saling menguntungkan kedua pihak, termasuk dengan Timor Timur.

Hubungan bilateral antara RI-Timor Timur secara resmi dimulai pada waktu kunjungan Presiden Megawati ke Timor Timur dalam upacara pelantikan Xanana Gusmao sebagai Presiden Timor Timur yang pertama pada tanggal 20 Mei 2002, kunjungan para Menteri dari kedua negara secara bergantian, dan adanya persetujuan diplomatik melalui penandatanganan kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Joint Commission* (JC). Dalam MoU disepakati adanya kerjasama dalam usaha membahas penyelesaian permasalahan yang ada diantara kedua negara, terutama mengenai aset-aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Timor Timur. Disamping itu, juga disepakati adanya kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, perhubungan, dan energi. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan MoU yang ditandatangani oleh kedua negara maka Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan, antara lain dengan membuka Kedutaan Besar di Timor Timur yang pada masa Pemerintahan Transisi (UNTAET) bernama KUKRI, membuka jalur transportasi

---

<sup>126</sup> Alwi Shihab, “Garis Besar Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI Memasuki Abad Ke-21”, Makalah yang disampaikan dalam acara curah pendapat tentang *Perkembangan Dunia Dan Kebijakan Luar Negeri RI*, (Jakarta, tanggal 22 November 2002).



darat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan sehingga Timor Timur bisa mendatangkan produk dari beberapa wilayah Republik Indonesia<sup>127</sup>.

Berdirinya negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Timur terjadi ditengah-tengah berlangsungnya krisis multidimensional di Indonesia, pada satu sisi memunculkan harapan baru bagi diplomasi Indonesia karena dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara lain. Di sisi lain, kemerdekaan Timor Timur melahirkan masalah-masalah baru pada tataran nasional maupun internasional. Pada tataran nasional, masalah Timor Timur dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya tuntutan dari beberapa daerah lain untuk mengadakan Jajak Pendapat sehingga dapat mengancam integrasi bangsa. Pada tataran internasional, berdirinya Timor Timur sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam hubungan antara kedua negara. Permasalahan tersebut merupakan sisa-sisa masalah (*residual matter*) yang merupakan warisan sejarah dari masa lalu, yaitu masalah psikologi atau emosional yang dialami oleh beberapa pihak yang kecewa dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Timor Timur. Berkaitan dengan masalah ini maka Pemerintah Republik Indonesia berusaha memberi pengertian kepada mereka agar dapat bersikap *forget and forgive* atas semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu karena kemerdekaan Timor Timur merupakan suatu proses sejarah dan kenyataan yang harus dihadapi. Masalah lain yang dihadapi oleh Pemerintah Republik

---

<sup>127</sup> *Media Indonesia*, tanggal 6 Juli 2002.

Indonesia dalam membina hubungan bilateral dan kerjasama dengan Pemerintah Timor Timur adalah berkaitan dengan aset-aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Timor Timur, batas wilayah, dan pengungsi. Meskipun belum ada kesepakatan tentang cara penyelesaian yang tepat berkaitan dengan persoalan aset Pemerintah Republik Indonesia di Timor Timur, pada saat ini sudah banyak para investor dari Indonesia yang menanamkan modalnya untuk membantu pembangunan di Timor Timur. Pemerintah Republik Indonesia juga berusaha untuk mengambil aset-aset tersebut sesuai prosedur konstitusi internasional melalui penandatanganan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Joint Commission* (JC). Untuk menyelesaikan masalah tentang batas wilayah, kedua negara mengikutsertakan para tokoh masyarakat dan pemangku adat yang bertempat tinggal di perbatasan kedua negara. Mereka diikutsertakan karena lebih mengetahui batas wilayah sebenarnya antara kedua negara yang telah ditentukan oleh para leluhur mereka pada masa lalu. Mereka juga berfungsi untuk memberi masukan dan bertindak sebagai penengah antara kedua negara. Dalam mengambil keputusan agar menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua negara dan tidak merugikan salah satu pihak. Sementara itu sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan registrasi dan repatriasi bagi para pengungsi untuk menentukan status kewarganegaraan mereka. Usaha ini dilakukan karena masalah pengungsi yang kebanyakan tinggal di perbatasan kedua negara, terutama di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi beban bagi Pemerintah Daerah setempat dan Pemerintah Pusat (Indonesia). Tidak jarang diantara para pengungsi

maupun antara para pengungsi dengan penduduk lokal terlibat konflik. Semua permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam membina hubungan bilateral yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Timur perlu untuk segera diselesaikan dengan cepat dan tidak dibiarkan berlarut-larut agar terhindar dari tekanan atau intervensi dan campur tangan pihak luar. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan baik dapat memperbaiki citra dan posisi pemerintah Republik Indonesia di forum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen/Arsip

Sekretariat Negara RI No.B-025/Setneg/Assus/9/1975 tentang terjemahan Petisi rakyat Timor Timur yang ditujukan kepada Presiden RI.

DPR RI Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

DPR RI No:AA-5/KD/1864/DPR-RI/1976 perihal persetujuan DPR RI mengenai RUU tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Lembaran Negara RI No.35,1976 mengenai Undang-Undang RI No.7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Lembaran Negara RI No.39,1976 mengenai Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1976 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten daerah Tingkat II di Timor Timur.

Lembaran Negara RI No.56, 1977 mengenai Keputusan Presiden RI No.63 Tahun 1977 tentang pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada para pengikut Gerakan Fretilin di Timor Timur.

Lembaran Negara RI No.3 Tahun 1978 mengenai Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1978 tentang Satya Lencana “Seroja”

### Artikel/ Makalah, Majalah, dan Surat Kabar

#### 1. Artikel/ Makalah

Alwi Shihab, “Garis Besar Kebijakan Luar Negeri Dan Diplomasi RI Memasuki Abad Ke-21”, Makalah disampaikan dalam acara curah pendapat tentang *Perkembangan Dunia Dan Kebijakan Luar Negeri RI*, ( Jakarta, tanggal 22 November 2002).

*Dekolonisasi Portugal*, diakses dari [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG)

*Indonesiasisasi*, diakses dari [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG).

Manuel Carrascalao, “Komite Bersama Pengadilan Internasional Untuk Kejahatan Perang”, diakses dari [WWW.ETAN.ORG](http://WWW.ETAN.ORG).

Sabam Siagian, “Kajian Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Timor Timur Pasca Pemisahan dan Bagi Integrasi Bangsa”, Makalah disampaikan dalam *Forum Dialog VII*, (Bandung: Balitbang Deplu RI, tanggal 6-8 Juli 2000).

*Sejarah Timor Timur Sejak 1974 Kekuasaan Portugal*, diakses dari [WWW.SOLIDAMOR.ORG](http://WWW.SOLIDAMOR.ORG).

*Tuntutan Pengembalian Aset RI di Republik Demokrasi Timor Lorosae*, diakses dari [WWW.Sekitar](http://WWW.Sekitar) Kita.Com.

## 2. Majalah

*Buletin Kay Rala Lian*, Edisi IV/Mei/1997.

*GATRA*, Edisi No.28.Tahun VII. 1 Juni 2002.

*TEMPO*, Edisi 23 November 1991.

*TEMPO*, Edisi 2 Juni 2001.

## 3. Surat Kabar

*Bali Post*, tanggal 26 April 2002.

*Jawa Pos*, tanggal 12 April 1999.

*Kedaulatan Rakyat*, tanggal 21 Agustus 2003.

*KOMPAS*, tanggal 1 Juni 1976.

*KOMPAS*, tanggal 18 Juni 1976.

*KOMPAS*, tanggal 1 Juli 1976.

*KOMPAS*, tanggal 15 November 1991.

*KOMPAS*, tanggal 29 Januari 1999.

*KOMPAS*, tanggal 6 April 1999.

*KOMPAS*, tanggal 25 April 1999.

*KOMPAS*, tanggal 26 April 1999.

*KOMPAS*, tanggal 7 Mei 1999.

*KOMPAS*, tanggal 5 Juni 1999.

*KOMPAS*, tanggal 6 September 1999.

*KOMPAS*, tanggal 8 September 1999.  
*KOMPAS*, tanggal 9 September 1999.  
*KOMPAS*, tanggal 10 September 1999.  
*KOMPAS*, tanggal 16 September 1999.  
*KOMPAS*, tanggal 29 September 1999.  
*KOMPAS*, tanggal 4 Maret 2000.  
*KOMPAS*, tanggal 29 April 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 5 Mei 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 7 Juni 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 15 Agustus 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 30 Agustus 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 3 September 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 26 Oktober 2001.  
*KOMPAS*, tanggal 25 April 2002.  
*Media Indonesia*, tanggal 6 Juli 2002.  
*Sinar Harapan*, tanggal 1 Juli 1976.  
*Sinar Harapan*, tanggal 20 Juli 1976.  
*Suara Karya*, tanggal 10 Desember 2003.  
*Suara Merdeka*, tanggal 6 September 1999.  
*Suara Merdeka*, tanggal 26 April 2002.  
*Suara Merdeka*, Mei 2002.

### **C. Buku/ Literature**

Departemen Penerangan RI.1981.*Timor Timur Membangun*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Gottschalk,Louis.1983.*Mengeri Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Hill,Helen Mary.2000.*Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*.Dili: Yayasan Hak dan Sahe Institute for Liberation.

- Holsti,K.J.1987.*Politik Internasional.Kerangka Analisa*.Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Lela.E.Madjiah.2002.*Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*.Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Machmuddin Noor,dkk.1981.*Lahirnya Propinsi Timor Timur*. Jakarta: Badan Penerbit almanak RI/Balai Pustaka.
- Mohtar Mas'oed. 1990.*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhadiantomo. 2000. *Hukum Reintegrasi Sosial. Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- PBB. 2000. *Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*. New York: Departemen Penerangan RI.
- Plano,Jack.C dan Olton, Roy. 1969. *The Internasional relations Dictionary*. New York: Rinehart dan Wiston Inc.
- Ritzer,George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Press.
- Schermant, Kent. 1967. *Writing History*. New York: Appleton Century Crofts.
- Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna. 2000. *Indonesia di Ambang Perpecahan?*. Jakarta.
- Sindhunata.2003.*Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur*.Yogyakarta: Galang Press.
- Taylor,John.G. 1998. *Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur Yang Dilupakan*. Dili:Fortilos.
- Tim Peneliti Balitbang Deplu RI.2000.*Interim Report Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur*, Jakarta: Balitbang Deplu RI.
- Tono Suratman. 2003. *Untuk Negaraku*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Van Klinken,Garry. 1996. *Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur*. Jakarta: ELSAM.

Wiranto. 2002. *Selamat Jalan Timor Timur: Pergulatan Menguk Kebenaran*. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.

W.Poespoprodjo. 1980. *Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya*. Bandung: Remaja Karya.

Zacky.A.Makarim,dkk. 2003. *Hari-Hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo.



